

# PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2025**





BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 14 TAHUN 2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu untuk melakukan penyesuaian rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025.

**Pasal 1**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di **Ngamprah**  
pada tanggal 25 Juni 2025  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**



**JEJE RITCHIE ISMAIL**

Diundangkan di **Ngamprah**  
pada tanggal 25 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

  
**ADE ZAKIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 serta dalam rangka penyesuaian visi, misi, arah kebijakan Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi seluruh Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya Perubahan RKPD 2025 dijadikan pedoman perumusan penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih

Bandung Barat,

2025

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan	II-1
2.2 Evaluasi Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Pembangunan	II-4
2.3 Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah	II-7
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat	III-2
3.1.1.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat	III-6
3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat	III-9
3.1.1.3 PDRB Per Kapita	III-12
3.1.1.4 Inflasi	III-13
3.1.1.5 Kondisi Ketenagakerjaan	III-17
3.1.1.6 Tingkat Kemiskinan	III-20
3.1.1.7 Gini Rasio	III-22
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025	III-23
3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional	III-23
3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat	III-24
3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Bandung Barat	III-28
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	III-31
3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional	III-31
3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat	III-32
3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat	III-34
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-36
3.2.1 Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah	III-37
3.2.2 Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah	III-40
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-42
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-3
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-7
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	IV-9
4.1.4 Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Nasional Tahun 2025	IV-17
4.1.5 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat	IV-20
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-22

4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-22
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-28
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	IV-31
4.2.4	Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	IV-35
4.2.5	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	IV-37
4.3.	Pelayanan Standar Pelayanan Minimal	IV-39
4.3.1	SPM BIDANG PENDIDIKAN	IV-41
4.3.2	SPM BIDANG KESEHATAN	IV-42
4.3.	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	IV-42
4.3.	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	IV-43
4.3.	SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	IV-43
4.3.	SPM BIDANG SOSIAL	IV-44
4.4.	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-45
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2025	II-2
2.2	Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target serta Realisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024 - 2025	II-5
2.3	Rekap Urusan Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten Bandung Barat Triwulan I Tahun 2025	II-9
3.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bandung Barat (Miliar Rupiah)	III-3
3.2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Bandung Barat (Miliar Rupiah)	III-4
3.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab. Bandung Barat, Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)	III-5
3.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024	III-5
3.5	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)	III-7
3.6	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020 - 2024 (persen)	III-8
3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)	III-10
3.8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 20202 - 2024 (persen)	III-11
3.9	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024	III-12
3.10	Perkembangan IHK dan Inflasi Tahun 2024	III-13
3.11	Inflasi m to m Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat	III-14
3.12	Inflasi y to y Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat	III-14
3.13	Perkembangan IHK dan Inflasi s.d April Tahun 2025	III-15
3.14	Inflasi m to m Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat	III-16
3.15	Inflasi y to y Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat	III-16
3.16	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023	III-18
3.17	Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	III-19
3.18	Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun	III-20

	2024 (Agustus)	
3.19	Percentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024	III-21
3.20	Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)	III-21
3.21	Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2025	III-27
3.22	Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2024-2025	III-30
3.23	Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 - 2025 (persen)	III-31
3.24	Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024, Realisasi 2024, APBD 2025 dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025	III-39
3.25	Rencana Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025	III-42
3.26	Pembentukan Daerah RKPD Perubahan Tahun 2025	III-43
4.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-7
4.2	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2025	IV-9
4.3	Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029	IV-10
4.4	Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029	IV-11
4.5	Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029	IV-14
4.6	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2025	IV-17
4.7	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan 8 Agenda Nasional	IV-18
4.8	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat	IV-21
4.9	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	IV-29
4.10	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	IV-32
4.11	Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat	IV-35
4.12	Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat	IV-38
4.13	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan	IV-41
4.14	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan	IV-42
4.15	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV-43
4.16	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV-43
4.17	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	IV-44
4.18	Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Sosial	IV-45
4.19	Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat	IV-45

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	III-11
3.2	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024	III-22
3.3	Grafik Capaian Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020– 2024	III-23
4.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	IV-6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang.

RKPD tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam rangka penyesuaian terhadap pencapaian target indikator kinerja yang mendukung terhadap visi misi arah dan kebijakan Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat. RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program/kegiatan berikut dengan target indikator kinerjanya. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat secara efisien dan efektif. Selain itu dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun 2025.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Target Pencapaian Kinerja serta Pendanaannya (Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah) dan disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dari ranwal pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD s.d triwulan I Tahun 2025; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
26. Surat Edaran nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah memberikan arah percepatan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang;
- b. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) Tahun 2025 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 disusun berdasarkan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latarbelakang perubahan RKPD Tahun 2025, landasan hukum pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025, maksud dan tujuan perubahan RKPD Tahun 2025 dan sistematika penulisan

**BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025**

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2025

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025 serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD tahun 2025 s.d triwulan I Tahun 2025

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat serta keterkaitannya serta strategi dan kebijakan pembangunan

**BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan yang secara rinci disajikan kegiatan/subkegiatan tahun 2025, pergeseran kegiatan/subkegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

**BAB VII : PENUTUP**

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan dalam pelaksanaan perubahan

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang: capaian indikator makro, evaluasi pelaksanaan program dan evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Pada RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah transisi sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan agenda pelantikan Kepala Daerah terpilih pada Bulan Februari 2025. Salah satu dasar dilaksanakannya perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu dalam rangka penyesuaian visi, misi, arah kebijakan Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1./640SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPD dan RKPD berdasarkan kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

#### **2.1      Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan**

Indikator makro merupakan salah satu indikator kinerja yang menjadi alat ukur ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Capaian indikator makro Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2024 menggambarkan aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indek Pembangunan Manusia dan aspek pembangunan ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Gini rasio dan Pendapatan Per Kapita, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2025**

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,82	70,77	71,33
2	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,40	10,49	9,71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,40	6,70	6,58
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,66	4,94	5,12
5	Gini Rasio	Point	0,341	0,400	0,366
6	Pendapatan Per Kapita	Juta	30.110	32.500	33,689
7	Penurunan Emisi GRK Komulatif **	Ton Co2eq	-	-	256.969,37

*Sumber: \* Target Tahun 2025, berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Jabar/Target RPJPD*

*\*\* Target Baru hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Jabar/Target RPJPD*

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator makro pembangunan s.d tahun 2024 hampir semua tidak mencapai target kecuali capaian IPM dan Pendapatan per Kapita telah melampui target.
- Capaian Indeks Pembangunan Manusia taun 2024 telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 101,4 persen. Pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 70 hingga 80 tetapi capaian IPM ini masih dibawah IPM nasional sebesar 75,02 dan IPM Jabar sebesar 74,92 bahkan bila dibandingkan dengan IPM Kab/Kota di Jawa Barat capaian IPM Kab. Bandung Barat berada di peringkat 20 dari 27 Kab/Kota.
- Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis terpadu dan menyeluruh dengan capaian angka kemiskinan tahun 2024 yang masih tinggi dengan capaian 10,49 persen atau terdapat 179,7 ribu jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat, capaian ini belum mencapai target bila dilihat dari target dari yang telah ditetapkan. Tingakt kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berada diurutan 22 paing tinggi dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat. Angka Kemiskinan merupakan hal yang harus diperhatikan ketercapaianya sesuai target di akhir tahun perencanaan ini.

- d. Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 meningkat dibanding capaian tahun 2023, bahkan capaian gini rasio ini belum memenuhi target malah ketimpangan semakin melebar manjauh dari batas akhir ketimpangan rendah ( $<0,4$ ). Pemerintah Daerah harus bertindak cepat karena jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.
- e. Konsisi perekonomian Kabupaten Bandung Bart bisa dibilang tidak baik-baik saja hal ini terlihat dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dari capaian tahun 2023 sebesar 5,00 persen melambat menjadi 4,94 persen. Capaian LPE ini tidak mencapai target bila dilihat dari target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 5,66 persen. Walaupun perekonomian masih tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 4,94 tetapi bila dilihat dari sector unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDRB di Kabupaten Bandung Barat cenderung turun. Menurunnya beberapa sector potensial seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya produktivitas padi akibat kekeringan lahan (dampak bencana el nino). Penyebab lain yaitu terus menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian. Penurunan peranan kategori Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat selama tahun 2024 (terjadi deflasi).
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kab. Bandung Barat Tahun 2024 sebesar 6,70 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 1,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (8,11 persen). Tetapi capaian TPT di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ini belum mencapai target bila dilihat dari target yang ditetapkan sebesar 6,40 persen.
- g. Perkembangan capaian PDRB per kapita di Kab. Bandung Barat menunjukan trend meningkat dan selalu mencapai target dengan capain di tahun 2023 sebesar 30,622 juta rupiah menjadi 32,500 juta rupiah di tahun 2024. Tetapi secara rata-rata, capaian PDRB per kapita Kabupaten Bandung Barat Barat selama 2 (dua) tahun terakhir ini masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Bila dibandingkan dengan capaian Kab/kota di Jabar, capaian PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat yang berada di interval PDRB per Kapita masih di bawah 30 juta. Hal ini menjadi tantangan

- tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi.
- h. Sedangkan terkait indikator makro Penurunan Emisi GRK Komulatif, sampai dengan tahun 2025 belum ada capaian, hal ini karena indikator ini merupakan indikator baru sebagai salah satu indikator utama pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045.
  - i. Capaian beberapa indikator makro diatas menunjukan bahwa pembangunan Kab. Bandung Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan peningkatan IPM Kab. Bandung Barat.

## **2.2 Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah,

Tujuan pembangunan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai di tahun perencanaan berkenan (Tahun 2025). Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, sebagaimana tertuang pada Bab VI dokumen RKPD Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran beserta capaian dan target indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target serta Realisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024 - 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024*	TARGET 2025**
1	<b>TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKESETARAAN</b>	<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	Poin	<b>69,82</b>	<b>70,77</b>	<b>71,33</b>
1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	a. Angka Harapan Hidup b. Prevalensi Stunting	Poin % SSGI % EPPGBM	73,30 22 5,16	75,06 * 4,95*	75,09 22 4,37
1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	a. Harapan Lama Sekolah b. Rata - Rata Lama Sekolah	Poin Poin	11,92 8,24	12,00 8,24	12,01 8,25
1.3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,48	1,40	1,39
1.4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	80,89	*	81,44
1.5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	a. Presentase Layanan Kepemudaan b. Indeks Pembangunan Olahraga	% Poin	10,30 0,45	10,34 0,45	10,35 0,46
2	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN</b>	<b>2.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI</b>	%	<b>5,66</b>	<b>4,94</b>	<b>5,12</b>
		<b>2.2 GINI RASIO</b>	Poin	<b>0,341</b>	<b>0,370*</b>	<b>0,366</b>
2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	a. Kontribusi Sektor Pertanian PDRB b. Kontribusi Sektor Perdagangan thd PDRB c. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	% % %	12,88 12,98 41,61	12,55* 12,07* 41,13*	12,89 12,38 41,20
2.2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Kontribusi Sub Sektor Pariwisata thd PDRB b. Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	% %	3 36,14	5,39* 38,51	5,60 42,22
2.3	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	a. Realisasi Nilai investasi b. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas c. Pertumbuhan Usaha Mikro	Trilyun % %	6,5 48,40 23,23	2,988* 46,45 31,30	3,5 50,00 32,00
2.4	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	%	10,40	10,49	9,71
2.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Presentase Desa Tahan Pangan	%	75,76	*	78,79
2.6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,40	6,70	6,05

<b>3</b>	<b>PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>	<b>INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS</b>	<b>Poin</b>	<b>25,55</b>	<b>25,55</b>	<b>25,11</b>
3.1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Percentase cakupan infrastruktur permukiman	%	66,72	*	79,69
3.2	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah	Indeks Aksebilitas / Transportasi	Poin	13,11	13,42*	13,06
3.3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100	*	100
3.4	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Katagori	0,49 (Sedang)	0,49 Sedang	0,50 Sedang
3.5	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	Percentase Desa Mandiri	%	53,94	*	12,12***
3.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,10	58,43	59,59
<b>4</b>	<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Nilai/ Katagori</b>	<b>74,85 (BB)</b>		<b>76,96 (BB)</b>
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	Nilai/ Katagori	71 (BB)	*	72 / BB
4.2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP	*	WTP
4.3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Merit	Skore	0,76	0,81	0,81***
4.4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Poin	3,40	3,78	3,85
4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,67	84,26	85,94
4.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Kearsipan	Poin	57,94	71,17	72,20
<b>5</b>	<b>TERWUJUDNYA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN TERTIB DALAM KERANGKA DEMOKRASI</b>	<b>INDEKS DEMOKRASI</b>	<b>Poin</b>	<b>70</b>		<b>85,20</b>
5.1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64	92,98	96,75
5.2	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	100	100	100

5.3	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	%	75	75	80
-----	--	---	---	----	----	----

*Sumber: BPS dan RKPD Tahun 2025*

### **2.3 Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah**

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bandung Barat pada Triwulan I Tahun 2025, secara umum masih belum menghasilkan capaian kinerja yang signifikan jika dilihat dari output dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dikatakan cukup wajar jika dilihat cara historikal dimana pada triwulan pertama pelaksanaan kegiatan berlum terlalu masih dan masih pada tahap persiapan/orientasi kinerja. Demikian dalam hal ini, setiap perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat perlu menentukan target kinerja pada setiap triwulan berdasarkan skala prioritas dan perhitungan tertentu.

Berdasarkan hasil analisis data pada Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengendalian dan Evaluasi telah menemukan beberapa permasalahan umum pada pelaksanaan RKPD dan Renja Triwulan I Tahun 2025. Demikian dalam perkembangannya, permasalahan sebagaimana dimaksud lebih banyak menyangkut tentang substansi dokumen perencanaan daripada tentang capaian kinerja. Adapun permasalahan umum sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan dalam rangkuman sebagaimana dibawah ini.

1. Adanya inkonsistensi sub kegiatan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Hal ini dapat dilihat dari banyak ditemukannya sub kegiatan pada APBD namun tidak ada dalam Renja/Renstra perangkat daerah sehingga secara periode perencanaan sub kegiatan tersebut tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya. Selain itu pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan tersebut secara normatif berpotensi tidak memiliki legalitas yang sah.
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang notabennya memuat informasi target pelaksanaan kinerja bulanan/triwulanan, eksistensinya tidak terlalu dianggap penting dimana hanya sebatas formalitas. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang berjalan tidak konsisten dengan penjadwalan sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3. Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak efektif dan cenderung mengalami reorientasi sebagai akibat dari agenda perubahan perencanaan Tahun 2025 yang mengacu pada Ranwal RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Adanya inkonsistensi satuan dan target indikator antara Renja dengan DPA sehingga penghitungan capaian kinerja pada beberapa sub kegiatan menjadi tidak valid atau tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya.
5. Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, secara langsung berdampak pada pembatasan pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan. Hal ini akan pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja dokumen perencanaan, dimana hanya akan berfokus pada sektor sosial dan infrastruktur. Sementara untuk sektor lainnya berpotensi tidak akan mencapai target kinerja pada Tahun 2025.
6. Realisasi capaian kinerja yang disampaikan oleh perangkat daerah pada Kertas Kerja Laporan Evaluasi Renja terkadang tidak didasarkan pada evidence atau bukti dukung yang jelas sehingga capaian kinerja cenderung bias dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya keterbatasan Bappelitbangda dalam mengawasi dan memverifikasi data capaian kinerja.
7. Adanya keterbatasan perangkat daerah dalam memahami teknis dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sehingga mempengaruhi validitas data yang dihasilkan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari masalah banyaknya perangkat daerah yang tidak mengisi realisasi kinerja dan hanya mengisi realisasi anggaran.

Adapun gambaran mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten Bandung Barat Triwulan I Tahun 2025 per urusan secara garis besar dapat dijelaskan melalui Tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Rekap Urusan Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Kabupaten Bandung Barat**  
**Triwulan I Tahun 2025**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu RKPD (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat (Fisik)	Keuangan RKPD (%)	Predikat RKPD	Keuangan APBD (%)	Predikat APBD
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(7)	(9)
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>563.183.578.135</b>	<b>1.060.479.439.361</b>	<b>18.360.959.992</b>	<b>3,73</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>3,26</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>1,73</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>1</b>	<b>Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>	<b>379.583.613.353</b>	<b>848.372.558.547</b>	<b>4.576.303.098</b>	<b>5,60</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>1,21</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>0,54</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>1.01</b>	Pendidikan	144.532.505.100	405.085.217.882	779.050.100	2,30	Sangat Rendah	0,54	Sangat Rendah	0,19	Sangat Rendah
<b>1.02</b>	Kesehatan	160.655.186.340	210.858.364.824	742.607.548	10,31	Sangat Rendah	0,46	Sangat Rendah	0,35	Sangat Rendah
<b>1.03</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.830.118.022	198.852.811.056	1.325.076.640	0,00	Sangat Rendah	2,96	Sangat Rendah	0,67	Sangat Rendah
<b>1.04</b>	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.561.451.937	16.141.038.208	414.864.700	0,00	Sangat Rendah	2,85	Sangat Rendah	2,57	Sangat Rendah
<b>1.05</b>	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.189.482.354	13.298.841.977	1.067.344.210	10,01	Sangat Rendah	9,54	Sangat Rendah	8,03	Sangat Rendah
<b>1.06</b>	Sosial	3.814.869.600	4.136.284.600	247.359.900	11,00	Sangat Rendah	6,48	Sangat Rendah	5,98	Sangat Rendah
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	<b>183.599.964.782</b>	<b>212.106.880.814</b>	<b>13.784.656.894</b>	<b>1,86</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>7,51</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>6,50</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>2.01</b>	Tenaga Kerja	5.116.568.108	9.535.997.676	311.435.568	0,00	Sangat Rendah	6,09	Sangat Rendah	3,27	Sangat Rendah
<b>2.02</b>	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.782.884.784	3.182.889.234			Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
<b>2.03</b>	Pangan	3.014.009.227	3.401.283.540	47.000.000	0,00	Sangat Rendah	1,56	Sangat Rendah	1,38	Sangat Rendah
<b>2.04</b>	Pertanahan	6.682.156.423	8.627.865.934	66.442.050	0,00	Sangat Rendah	0,99	Sangat Rendah	0,77	Sangat Rendah
<b>2.05</b>	Lingkungan Hidup	39.790.004.225	39.064.679.033	2.377.786.760	0,00	Sangat Rendah	5,98	Sangat Rendah	6,09	Sangat Rendah
<b>2.06</b>	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	7.386.453.316	6.656.836.216	124.695.400	5,10	Sangat Rendah	1,69	Sangat Rendah	1,87	Sangat Rendah
<b>2.07</b>	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.407.564.071	14.348.417.896	1.421.341.300	10,42	Sangat Rendah	11,46	Sangat Rendah	9,91	Sangat Rendah
<b>2.08</b>	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.929.132.536	22.552.729.336			Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

<b>2.09</b>	Perhubungan	15.059.387.454	13.337.859.197	892.025.346	1,39	Sangat Rendah	5,92	Sangat Rendah	6,69	Sangat Rendah
<b>2.10</b>	Komunikasi dan Informatika	42.125.645.733	40.471.868.085	512.611.110	1,96	Sangat Rendah	1,22	Sangat Rendah	1,27	Sangat Rendah
<b>2.11</b>	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.865.427.650	4.963.668.700	404.884.700	2,20	Sangat Rendah	8,32	Sangat Rendah	8,16	Sangat Rendah
<b>2.12</b>	Penanaman Modal	1.660.498.422	2.054.681.964	101.031.000	0,64	Sangat Rendah	6,08	Sangat Rendah	4,92	Sangat Rendah
<b>2.13</b>	Kepemudaan dan Olahraga	23.635.547.936	32.036.486.693	6.841.408.283	5,50	Sangat Rendah	28,95	Sangat Rendah	21,36	Sangat Rendah
<b>2.14</b>	Statistik	1.175.437.631	728.571.728	60.431.600	2,50	Sangat Rendah	5,14	Sangat Rendah	8,29	Sangat Rendah
<b>2.15</b>	Persandian	1.462.811.887	1.075.646.366	2.122.967	0,00	Sangat Rendah	0,15	Sangat Rendah	0,20	Sangat Rendah
<b>2.16</b>	Kebudayaan	2.025.065.075	1.910.558.144	29.980.810	0,00	Sangat Rendah	1,48	Sangat Rendah	1,57	Sangat Rendah
<b>2.17</b>	Perpustakaan	6.770.065.563	6.519.817.531	360.460.000	0,00	Sangat Rendah	5,32	Sangat Rendah	5,53	Sangat Rendah
<b>2.18</b>	Kearsipan	1.711.304.741	1.637.023.541	231.000.000	0,00	Sangat Rendah	13,50	Sangat Rendah	14,11	Sangat Rendah
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>39.421.719.096</b>	<b>44.414.557.537</b>	<b>1.530.950.605</b>	<b>4,16</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>3,88</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>3,45</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>3.01</b>	Kelautan dan Perikanan	5.327.051.490	4.452.746.330	77.781.420	0,00	Sangat Rendah	1,46	Sangat Rendah	1,75	Sangat Rendah
<b>3.02</b>	Pariwisata	7.030.410.962	6.940.695.239	74.990.540,00	2,50	Sangat Rendah	1,07	Sangat Rendah	1,08	Sangat Rendah
<b>3.03</b>	Pertanian (DKPP)	4.389.141.523	7.193.024.292	152.070.000	0,00	Sangat Rendah	3,46	Sangat Rendah	2,11	Sangat Rendah
	Pertanian (DISPERNAKAN)	17.908.893.461	20.061.597.663	282.623.895	0,00	Sangat Rendah	1,58	Sangat Rendah	1,41	Sangat Rendah
<b>3.04</b>	Perdagangan	2.158.414.332	2.158.416.685	684.281.000	10,19	Sangat Rendah	31,70	Sangat Rendah	31,70	Sangat Rendah
<b>3.05</b>	Perindustrian	2.607.807.328	3.608.077.328	259.203.750	12,27	Sangat Rendah	9,94	Sangat Rendah	7,18	Sangat Rendah
<b>3.06</b>	Transmigrasi	0	0	0	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
<b>4</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18.016.147.378</b>	<b>25.945.726.576</b>	<b>2.718.047.470</b>	<b>12,13</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>15,09</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>10,48</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>4.01</b>	Sekretariat Daerah	16.240.984.016	18.696.532.365	307.239.854	24,26	Sangat Rendah	1,89	Sangat Rendah	1,64	Sangat Rendah
<b>4.02</b>	Sekretariat DPRD	19.791.310.740	33.194.920.786	5.128.855.085	0,00	Sangat Rendah	25,91	Sangat Rendah	15,45	Sangat Rendah
<b>5</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>532.042.193.375</b>	<b>575.362.625.320</b>	<b>31.394.583.134</b>	<b>8,87</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>5,90</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>5,46</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>5.01</b>	Perencanaan	3.736.521.200	6.443.207.000	577.789.800	26,14	Sangat Rendah	15,46	Sangat Rendah	8,97	Sangat Rendah
<b>5.02</b>	Keuangan	523.546.207.275	561.541.667.764	29.459.395.548	1,04	Sangat Rendah	5,63	Sangat Rendah	5,25	Sangat Rendah
<b>5.03</b>	Kepegawaian	2.739.941.700	3.354.257.956	224.034.090	0,52	Sangat Rendah	8,18	Sangat Rendah	6,68	Sangat Rendah
<b>5.04</b>	Penelitian dan Pengembangan	855.750.000	900.000.000	35.400.000	0,00	Sangat Rendah	4,14	Sangat Rendah	3,93	Sangat Rendah

<b>5.05</b>	Pendidikan dan Pelatihan	1.163.773.200	3.123.492.600	1.097.963.696	16,67	Sangat Rendah	94,35	Sangat Tinggi	35,15	Sangat Rendah
<b>6</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>7.025.334.000</b>		<b>625.408.200</b>	<b>36,46</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>8,90</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>11,29</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>6.01</b>	Pengawasan	7.025.334.000	5.540.531.400	625.408.200	36,46	Sangat Rendah	8,90	Sangat Rendah	11,29	Sangat Rendah
<b>7</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>7.01</b>	Kecamatan					Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
<b>8</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8.972.003.800</b>	<b>9.120.775.700</b>	<b>120.850.000</b>	<b>3,51</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>1,35</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>1,32</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>8.01</b>	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.972.003.800	9.120.775.700	120.850.000	3,51	Sangat Rendah	1,35	Sangat Rendah	1,32	Sangat Rendah
<b>9</b>	<b>NON URUSAN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>0,00</b>	<b>Sangat Rendah</b>
9.01	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	<b>TOTAL</b>	<b>1.168.660.975.784</b>	<b>1.715.323.124.493</b>	<b>54.750.799.400</b>	<b>8,07</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>4,68</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>3,19</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Berdasarkan Tabel 2.3 sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa secara rata-rata capaian kinerja seluruh urusan masih berada pada kategori “Sangat Rendah” dengan rata-rata capaian sebesar 12,59%. Sementara untuk realisasi anggaran juga berada pada kategori “Sangat Rendah” dengan rata-rata realisasi sebesar 14,21% terhadap pagu RKPD dan 11,20% terhadap pagu APBD. Gambaran ringkas mengenai capaian kinerja per urusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 5,60% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 1,21% terhadap pagu RKPD dan 0,54% terhadap pagu APBD.
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 1,86% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 7,51% terhadap pagu RKPD dan 6,50% terhadap pagu APBD.
3. Urusan Pilihan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 4,16% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 3,88% terhadap pagu RKPD dan 3,45% terhadap pagu APBD.
4. Pendukung Urusan Pemerintahan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 12,13% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 15,09% terhadap pagu RKPD dan 10,48% terhadap pagu APBD.
5. Penunjang Urusan Pemerintan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 8,87% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 5,90% terhadap pagu RKPD dan 5,46% terhadap pagu APBD.
6. Urusan Pengawasan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 36,46% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 8,90% terhadap pagu RKPD dan 11,29% terhadap pagu APBD.
7. Urusan Kewilayahan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 28,60% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 35,66% terhadap pagu RKPD dan 30,16% terhadap pagu APBD.
8. Urusan Pemerintahan Umum memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 3,51% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 1,35% terhadap pagu RKPD dan 1,32% terhadap pagu APBD.
9. Non Urusan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 12,12% dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 14,21% terhadap pagu RKPD dan 11,20% terhadap pagu APBD.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat sampai dengan akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 berdasarkan prospek ekonomi hasil perhitungan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Bandung Barat sampai dengan akhir tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan latarbelakang perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dibahas pada bab sebelumnya yaitu dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 memastikan beberapa tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional di tahun 2025, mencakup:

- a. Penguatan SDM pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM

Sejalan dengan prioritas nasional, di Kabupaten Bandung Barat arah kebijakan bidang perekonomian yang tercantum di dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Bandung Barat AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sebagaimana dirumuskan mengenai upaya-upaya dalam mewujudkan Visi tersebut sebagaimana tercantum pada Misi ke 2 yaitu “Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah”. Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 yang ingin dicapai pada Misi ke 2 dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
3. Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024, target dan capaian kinerja sector ekonomi s.d triwulan I tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran yang disajikan atas harga berlaku dan harga konstan.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2023-2024, PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari 56.945,18 miliar Rupiah di tahun 2023 menjadi 61.236,34 miliar rupiah di tahun 2024.

Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.291,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 56.945,18 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB Bandung Barat ini dipengaruhi oleh dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume serta meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha.

**Tabel 3.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bandung Barat (Miliar Rupiah)**

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00
2	Pertambangan dan Penggalian	476,31	506,84	517,68	535,90	574,97
3	Industri Pengolahan	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94
4	Listrik dan Gas	375,83	418,08	441,35	463,10	511,74
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	19,68	21,60	23,85	24,50	28,83
6	Konstruksi	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63
7	Perdagangan besar dan eceran	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22
8	Transportasi dan pergudangan	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71
10	Informasi dan komunikasi	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	455,56	490,38	516,24	612,70
12	Real Estate	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39
13	Jasa Perusahaan	192,79	218,83	253,49	283,21	325,89
14	Adm. pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23
15	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	258,02	274,36	290,83	316,87	388,32
17	Jasa lainnya	501,60	503,35	558,78	614,81	713,04
<b>PDRB ADHB</b>		<b>46.478,90</b>	<b>48.764,31</b>	<b>52.921,29</b>	<b>56.945,18</b>	<b>61.236,34</b>

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, BPS.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Kab. Bandung Barat juga mengalami peningkatan dari 35.062,19 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 36.793,68 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi 4,94 persen dibandingkan nilai tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Bandung Barat (Miliar Rupiah)**

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.711,11	3.672,82	3.823,82	3.884,46	4.100,25
2	Pertambangan dan Penggalian	322,49	342,68	342,29	344,65	355,05
3	Industri Pengolahan	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29	15.171,50
4	Listrik dan Gas	229,82	254,96	266,93	273,12	282,88
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	12,68	13,89	14,95	15,28	15,82
6	Konstruksi	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35	266,56
7	Perdagangan besar dan eceran	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13	4.684,35
8	Transportasi dan pergudangan	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38	2.080,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42	1.987,30
10	Informasi dan komunikasi	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47	1.335,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	277,91	274,48	284,16	303,95
12	Real Estate	616,38	677,19	731,75	777,36	840,82
13	Jasa Perusahaan	135,50	146,31	161,89	173,66	184,85
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	706,20	688,15	666,91	683,00	728,77
15	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48	1.414,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	172,47	182,98	192,58	203,64	214,94
17	Jasa lainnya	343,91	346,54	368,39	393,35	431,41
<b>PDRB ADHK</b>		<b>30.640,41</b>	<b>31.701,79</b>	<b>33.393,29</b>	<b>35.062,19</b>	<b>36.793,68</b>

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan dan penurunan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab. Bandung Barat, Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	31.260,37	32.262,77	35.585,57	38.762,46	41.370,11
Konsumsi LNPRT	443,14	455,28	486,47	556,40	612,28
Konsumsi Pemerintah	2.948,57	3.078,08	3.080,70	3.204,43	3.514,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.354,54	10.540,03	11.216,89	12.110,42	12.639,69
Perubahan Inventori	661,74	-387,66	58,65	50,86	63,27
Net Ekspor/(Ekspor-Impor)	1.810,54	2.815,82	2.493,01	2.260,61	3.036,10
<b>PDRB / GRDP</b>	<b>46.478,90</b>	<b>48.764,31</b>	<b>52.921,29</b>	<b>56.945,18</b>	<b>61.236,34</b>

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024, BPS.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluanasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari berikut ini:

**Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1. Konsumsi Rumah Tangga	19.770,88	20.033,77	20.909,97	21.921,28	22.974,98
2. Konsumsi LNPRT	300,82	305,53	314,86	347,42	374,95
3. Konsumsi Pemerintah/	1.770,07	1.806,28	1.765,63	1.817,98	1.960,37
4. Pembentukan Modal Tetap	6.529,16	7.009,20	7.050,77	7.371,64	7.726,05
5. Perubahan Inventori	374,39	-208,71	31,57	26,59	32,25
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	1.895,08	2.755,72	3.320,49	3.577,28	3.725,08
<b>PDRB / GRDP</b>	<b>30.640,41</b>	<b>31.701,79</b>	<b>33.393,29</b>	<b>35.062,19</b>	<b>36.793,68</b>

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023, BPS.

Percepatan pertumbuhan ekonomi ini secara umum dikarenakan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berangsur-angsur menuju normal sejalan dengan proses transisi status dari pandemi menuju endemi. Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2024 mengakibatkan kegiatan perekonomian semakin aktif.

Berputarnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor disertai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tetapi bila dilihat dari perkembangannya, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024), kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat menunjukkan trend yang kurang baik, berturut-turut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami perlambatan, dari 5,34 persen (2022) menjadi 5,00 persen (2023) dan kembali melambat di tahun 2024 menjadi 4,94 persen. Perlambatan tersebut dari sisi produksi dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di beberapa subkategori pada kategori industri pengolahan, menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak deflasi serta melambatnya pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat kekeringan dan el nino. Sedangkan perlambatan perekonomian di tahun 2024 dari sisi permintaan akhir dipengaruhi oleh adanya penurunan daya beli masyarakat selama tahun 2024. Hal ini mengakibatkan lesunya konsumsi rumah tangga sebagai pemberi kontribusi terbesar pada kegiatan perekonomian, sehingga aktivitas ekonomi dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran yang melambat mendorong penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum.

### **3.1.1.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 40,85 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,63 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,38 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,92 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,20 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,23 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

**Tabel 3.5 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)**

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,28	12,59	12,87	12,73	12,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,04	0,98	0,94	0,94
3	Industri Pengolahan	40,33	41,40	41,60	41,66	40,85
4	Listrik dan Gas	0,81	0,86	0,83	0,81	0,84
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,36	7,55	7,33	7,35	6,92
7	Perdagangan besar dan eceran	12,89	12,69	12,35	12,40	12,38
8	Transportasi dan pergudangan	5,24	5,15	5,49	5,99	6,20
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	4,96	5,26	5,38	5,23
10	Informasi dan komunikasi	2,15	2,19	2,12	2,09	2,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9	0,93	0,93	0,91	1,00
12	Real Estate	1,84	1,93	1,92	1,93	1,98
13	Jasa Perusahaan	0,41	0,45	0,48	0,5	0,53
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan Social wajib	2,73	2,55	2,27	2,19	2,14
15	Jasa Pendidikan	4,18	4,07	3,93	3,95	4,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,56	0,56	0,55	0,56	0,63
17	Jasa lainnya	1,08	1,03	1,06	1,08	1,16
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2025, BPS 2025

Dari Tabel tersebut, di antara keenam lapangan usaha tersebut, kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan peranan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah kategori yang mengalami penurunan peranan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya produktivitas padi akibat kekeringan lahan (dampak bencana el nino). Penyebab lain yaitu terus menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Penurunan peranan kategori Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat selama tahun 2024 (terjadi deflasi).

Berdasarkan strukturnya dari sisi pengeluaran, terbentuknya total PDRB pengeluaran tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, dengan persen distribusi terbesar pembentuk PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK- RT) sebesar 67,56 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20,64 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,74 persen, sementara peranan pengeluaran konsumsi akhir lainnya masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Dari sisi pengeluaran selama periode 2020-2024, PDRB Kabupaten Bandung Barat sebagian besar (lebih dari 65 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) dan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) yakni sebesar 20,13 s.d 21,61 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,63 - 6,34 persen. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing komponen PDRB ADHB menutut pengeluaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020 - 2024 (persen)**

KOMPONEN PENGELOUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>67,26</b>	<b>66,16</b>	<b>67,24</b>	<b>68,32</b>	<b>67,56</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	36,47	36,21	37,31	38,14	37,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,39	2,31	2,24	2,21	2,19
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,85	9,43	9,36	9,44	9,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,36	2,34	2,28	2,28	2,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10,86	10,68	10,91	11,08	10,91
1.f. Hotel dan Restoran	2,56	2,49	2,50	2,54	2,62
1.g. Lainnya	2,77	2,69	2,64	2,63	2,67
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,95</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>6,34</b>	<b>6,31</b>	<b>5,82</b>	<b>5,63</b>	<b>5,74</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>20,13</b>	<b>21,61</b>	<b>21,20</b>	<b>21,27</b>	<b>20,64</b>
4.a. Bangunan	19,30	20,75	20,32	20,37	19,60
4.b. Non Bangunan	0,83	0,87	0,88	0,90	1,04
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>1,42</b>	<b>-0,79</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
<b>6. Net Ekspor Impor Antar Daerah</b>	<b>3,90</b>	<b>5,77</b>	<b>4,71</b>	<b>3,72</b>	<b>4,96</b>
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran, BPS.

Dari tabel diatas, Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bandung Barat, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga

### **3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2024 melambat dibandingkan tahun 2023. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di beberapa subkategori pada kategori industri pengolahan, menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak deflasi. Aktivitas ekonomi yang melambat mendorong penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 36.793, 68 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.731,50 miliar dari 35.062,18 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kategori industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya tumbuh 6,48 persen, dibanding laju 2023 yang mencapai 9,20 persen. Kategori industri pengolahan melambat sebesar 2,16 persen (dari 5,30 persen tahun 2023 menjadi 3,14 persen tahun 2024).

Kategori jasa perusahaan serta transportasi dan pergudangan tumbuh melambat sebesar 6,45 persen dan 9,80 persen. Capaian tersebut lebih lambat dibanding tahun 2023 yang lajunya mencapai 7,27 persen dan 10,37 persen.

Pertumbuhan yang relatif lambat juga terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang lajunya 5,5 persen, lebih lambat dari tahun 2023 sebesar 5,74 persen. Lapangan usaha lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 ada 12 kategori. Percepatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 6,70 persen dibanding capaian 2023 sebesar 2,41 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lajunya tumbuh cepat sebesar 5,56 persen, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,97 persen. Informasi dan komunikasi tumbuh positif sebesar 8,71 persen, diikuti Kategori Pertambangan dan Penggalian, serta jasa lainnya yang tumbuh sebesar 3,02 persen dan 9,68 persen. Adapun lima apangan usaha lainnya memiliki peningkatan laju yang relatif kecil dibanding tahun 2023. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Real Estate. Tabel berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2020 – 2024.

**Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)**

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,18	6,26	-0,11	0,69	3,02
C	Industri Pengolahan	-2,42	4,87	6,43	5,30	3,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08	10,94	4,70	2,32	3,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,21	9,58	7,61	2,23	3,51
F	Konstruksi/Construction	-5,71	7,38	1,75	4,48	5,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,15	2,93	3,93	4,03	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,82	1,10	9,95	10,37	9,80
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	-4,67	-0,99	10,03	9,20	6,48
J	Informasi dan Komunikasi/	27,03	7,79	5,58	6,27	8,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24	3,53	6,97
L	Real Estat	0,21	9,86	8,06	6,23	8,16
M,N	Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65	7,27	6,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	-2,56	-3,09	2,41	6,70
P	Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44	3,96	6,97
Q	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	-0,28	6,09	5,25	5,74	5,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,38	0,76	6,30	6,78	9,68
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-2,41</b>	<b>3,46</b>	<b>5,34</b>	<b>5,00</b>	<b>4,94</b>

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS

Bila dilihat dari sisi permintaan akhir (*demand side*) atau PDRB pengeluaran, terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan dengan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB pengeluaran selama periode tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 20202 - 2024 (persen)**

KOMPONEN PENGELOUARAN	2020	2021	2022	2023	2024*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,88	1,33	4,37	4,84	4,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,58	1,57	3,05	10,34	7,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,02	2,05	-2,25	2,96	7,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,24	7,35	0,59	4,55	4,81
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
<b>PDRB</b>	<b>-2,41</b>	<b>3,46</b>	<b>5,34</b>	<b>5,00</b>	<b>4,94</b>

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran, BPS.

Pada tabel diatas, bahwa pertumbuhan terbesar PDRB menurut pengeluaran tahun 2024 adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,92 persen sedangkan komponen PMTB mengalami pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 4,81 persen. Pada skala regional Jaa Barat dan secara Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional dengan relisasi sebesar sebesar 5,03 persen, dan masih dibawah capaian Provinsi Jawa Barat dengan LPE sebesar 4,95 persen, seperti terlihat pada diagram berikut:

**Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024, diolah Bappelitbangda.

### 3.1.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Bandung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren yang positif. Peningkatan nilai PDRB per kapita ADHB terus meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Tahun 2020 nilai PDRB per kapita mencapai 26.088,5 ribu rupiah, angka tersebut naik tipis sebesar 876,73 ribu rupiah menjadi 26.965,2 ribu rupiah tahun 2021 (lihat tabel 3.9). Capaian PDRB per kapita tahun 2022-2024 terus mengalami akselerasi kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan tersebut sebesar 1.886,90 pada tahun 2022; sebesar 1.769,57 pada tahun 2023 dan 1.878,39 ribu rupiah pada tahun 2024. Kenaikan Nilai PDRB per kapita tahun 2022-2024 masing-masing menjadi 28.852,1 pada tahun 2022, 30.621,7 pada tahun 2023 dan 32.500,1 ribu rupiah pada tahun 2024, dengan peningkatan PDRB per kapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 3.9 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024**

Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
- ADHB	46.478.896,6	48.764.313,9	52.921.291,1	56.945.184,0	61.236.339,0
- ADHK	30.640.409,5	31.701.785,5	33.393.286,9	35.062.186,4	36.793.684,3
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousands rupiahs)					
- ADHB	26.088,5	26.965,2	28.852,1	30.621,7	32.500,1
- ADHK	17.198,4	17.530,1	18.205,7	18.854,3	19.527,6
- Pertumbuhan PDRB per Kapita	-8,39	1,93	3,85	3,56	3,57
Jumlah Penduduk (ribu orang)	1.781.587	1.808.416	1.834.226	1.859.636	1.884.191
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	6,52	1,51	1,43	1,39	1,32

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran, BPS.

### 3.1.1.4 Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota/kab rujukan inflasi, dimana kota/kab inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis. Mulai tahun 2024 Kabupaten Bandung merupakan rujukan inflasi Kab. Bandung Barat karena memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis serta sebagian wilayah masyarakat Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah pada inflasi Kabupaten Bandung.

Berikut ditampilkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi m to m serta inflasi y to y Kabupaten Bandung tahun 2024 menurut kelompok pengeluaran yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat.

**Tabel 3.10 Perkembangan IHK dan Inflasi Tahun 2024**

IHK dan Inflasi	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
IHK	106,39	106,72	107,14	107,26	107,24	107,36	107,57	107,43	107,22	107,26	107,66	107,88
Inflasi m-to-m	0,06	0,31	0,39	0,11	-0,02	0,11	0,20	-0,13	-0,20	0,04	0,37	0,2
Inflasi y-to-y	4,11	4,02	4,26	3,21	3,04	2,24	2,34	2,30	2,28	1,86	1,60	1,46

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025

Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,46 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 107,88 pada Desember 2024 dan secara m-to-m mengalami inflasi sebesar 0,20 persen.

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Bandung sebagai rujukan inflasi dan IHK Kabupaten Bandung Barat mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan deflasi sebanyak 3 (tiga) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2024 sebesar 0,39 persen dan deflasi terjadi pada bulan Mei, Agustus dan September 2024.

**Tabel 3.11 Inflasi m to m Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024  
Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat**

Kelompok	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Umum</b>	<b>0,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,39</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,37</b>	<b>0,2</b>
Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01	0,81	1	-0,42	-0,36	0,02	-0,05	-0,60	-0,59	0,24	0,84	0,48
Pakaian Dan Alas Kaki	0,01	0,02	-	2,35	-0,11	-0,24	0,1	0,07	-0,21	0,09	0,01	
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah	0,02	-0,02	-0,03	0,2	0,06	0,08	0,29	-0,3	-0,01	0,00	0,08	
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin	-0,01	0,06	0,02	0,15	0,1	0,26	0,65	0,41	0,04	0,09	0,02	0,09
Kesehatan	0,8	-	-	-	0,16	0,03	0,04	0,00	0,22	0,00	-	
Transportasi	-0,29	-	-0,01	-	0,15	-0,03	-	0,55	-0,53	-0,78	0,01	
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,5	-0,23	-	-0,01	-	-	-	-0,01	0,00	-0,14	-	
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	-	-	-	1,00	0,67	-	-	-	-0,26	-	-	
Pendidikan	-	-	-	-	-	-	2,04	0,08	0,72	-	-	
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,74	0,07	-	0,25	0,18	0,97	-	0,22	0,13	-	0,31	
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0,28	0,08	0,07	1,14	1,03	0,03	0,8	0,48	0,62	0,29	0,21	0,21

Sumber: BPS Prov. Jabar, Des 2025

**Tabel 3.12 Inflasi y to y Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024  
Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat**

Kelompok	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Umum</b>	<b>4,11</b>	<b>4,02</b>	<b>4,26</b>	<b>3,21</b>	<b>3,04</b>	<b>2,24</b>	<b>2,34</b>	<b>2,3</b>	<b>2,28</b>	<b>1,86</b>	<b>1,6</b>	<b>1,46</b>
Makanan, Minuman Dan Tembakau	7,08	7,01	7,68	5,07	4,16	2,75	2,64	2,34	2,39	1,82	1,4	1,36
Pakaian Dan Alas Kaki	-0,2	-0,58	-0,66	-1,86	1,98	3,6	3,6	3,35	3,14	2,54	2,34	2,07
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah	0,93	0,91	0,88	1,08	1,01	0,66	0,91	0,56	0,6	0,57	0,33	0,36
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin	2,09	2,11	2,02	2,39	1,62	1,06	1,74	2,57	2,44	2,45	2,11	1,89
Kesehatan	3,9	3,82	3,82	4,72	4,65	4,28	3,81	3,73	3,97	3,14	2,51	1,26
Transportasi	-0,14	-0,14	-0,16	-0,09	0,07	-0,48	-0,52	0,1	-0,37	-1,05	-1,08	-0,92
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,67	-0,95	-0,95	-0,88	-0,81	-0,83	-0,83	-0,88	-1	-0,85	-0,89	-0,89
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,26	1,26	1,26	1,18	2,87	2,64	2,47	1,96	1,7	1,7	1,67	1,41
Pendidikan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,03	2,04	2,11	2,85	2,85	2,85	2,85
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	7,87	7,8	7,8	7,14	6,2	4,69	3,97	4,01	3,81	2,86	3,18	2,91
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	6,69	6,39	6,44	6,56	6,38	4,98	6,25	6,79	6,83	7,12	6,27	5,37

Sumber: BPS Prov. Jabar, Des 2025

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,41 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,85 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,91 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,37 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen dan juga kelompok transportasi sebesar 0,92 persen

Sedangkan perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi s.d Bulan April tahun 2025 sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pada bidang perekonomian sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Perkembangan IHK dan Inflasi s.d April Tahun 2025**

IHK dan Inflasi	Januari	Februari	Maret	April
IHK	106,81	106,24	108,05	108,99
Inflasi m-to-m	-0,99	-0,53	1,70	0,87
Inflasi y-to-y	0,39	-0,45	0,85	1,61

*Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, Mei 2025*

Pada Bulan April 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,61 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari April 2024 sebesar 107,26 menjadi 108,99 pada April 2025 dan secara m-to-m mengalami inflasi sebesar 0,87 persen. Selama 4 (empat) bulan terakhir tahun 2025, Kabupaten Bandung sebagai rujukan inflasi dan IHK Kabupaten Bandung Barat mengalami 2 kali inflasi (Maret dan April) dan 2 kali deflasi (Jan dan Feb). Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2025 sebesar 0,87 persen dan deflasi terjadi pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025.

**Tabel 3.14 Inflasi m to m Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024  
Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat**

Kelompok	Jan	Feb	Maret	April
<b>Umum</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0,53</b>	<b>1,7</b>	<b>0,87</b>
Makanan, Minuman Dan Tembakau	1,11	-0,16	1,17	-0,33
Pakaian Dan Alas Kaki	-	0,12	0,44	0,05
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-14,87	-6,8	14,7	10,13
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,03	-0,16	-0,23	0,23
Kesehatan	0,24	0,39	-	-
Transportasi	0,4	0,45	-	-0,33
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-	-	-	-0,34
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	-	-	-	-
Pendidikan	-	-	-	-
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,02	0,25	0,14	0,1
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0,15	0,45	0,56	1,68

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, Mei 2025

**Tabel 3.15 Inflasi y to y Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024  
Sebagai Rujukan Inflasi Kab. Bandung Barat**

Kelompok	Jan	Feb	Maret	April
<b>Umum</b>	<b>0,39</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,85</b>	<b>1,61</b>
Makanan, Minuman Dan Tembakau	2,5	1,5	1,67	1,76
Pakaian Dan Alas Kaki	2,06	2,17	2,62	0,31
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-14,58	-20,37	-8,64	0,42
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,93	1,71	1,46	1,53
Kesehatan	0,69	1,08	1,08	1,08
Transportasi	-0,24	0,22	0,23	-0,1
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,39	-0,16	-0,16	-0,49
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,41	1,41	1,41	0,41
Pendidikan	2,85	2,85	2,85	2,85
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	2,17	2,35	2,5	2,35
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	5,23	5,62	6,14	6,71

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, Mei 2025

Beberapa komoditi yang memberi andil inflasi terbesar pada bulan April 2025, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,71 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,85 persen dan penyediaan mamin (restoran) sebesar 2,35 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,49 persen dan juga kelompok transportasi sebesar 0,1 persen.

### **3.1.1.5 Kondisi Ketenagakerjaan**

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.443.076 orang, sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 978.735 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 454.341 orang. Komposisi angkatan kerja pada tahun 2024 terdiri dari 913.126 orang penduduk yang bekerja dan 65.609 orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat sebanyak 42.857 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,7 persen, sementara pengangguran turun sebanyak 11.246 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. TPAK pada tahun 2024 sebesar 67,82 persen, naik 0,81 persen poin dibandingkan tahun 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,12 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 48,83 persen. Jika dibandingkan tahun 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,6 persen poin (dari 87,72 persen menjadi 87,12 persen) dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,28 persen poin (dari 45,55 persen menjadi 48,83 persen).

**Tabel 3.16 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Tahun 2024 (orang)	Perubahan Thn 2022 - Thn 2023 (orang)	Perubahan Thn 2022 - Thn 2023 (persen)	Perubahan Thn 2023 - Thn 2024 (orang)	Perubahan Thn 2023 - Thn 2024 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	1.273.131	1.413.347	1.443.076	140.216	11,01	29.729	2,10
<b>Angkatan Kerja</b>	819.559	947.124	978.735	127.565	15,57	31.611	3,33
- Bekerja	740.639	870.269	913.126	129.630	17,50	42.857	4,92
- Pengangguran	78.920	76.855	65.609	-2.065	-2,62	-11.246	-14,63
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	453.527	466.223	453.341	12.696	2,80	-11.882	-2,54
	persen	persen	persen	persen poin		persen	persen poin
<b>TPAK</b>	64,37	67,01	67,82	2,64		0,81	
- Laki-Laki	85,48	87,72	87,12	2,24		-0,60	
- Perempuan	42,71	45,55	48,83	2,84		3,28	

Sumber: Ketenagakerjaan KBB , BPS 2024.

Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan kriterianya, adalah sebagai berikut:

➤ Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sektor jasa sebesar 47,91 persen; sektor manufaktur sebesar 32,56 persen; dan Pertanian sebesar 19,53 persen. Dibandingkan tahun 2023 (Agustus), lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor manufaktur (23.064 orang), sektor pertanian (12.778 orang) dan sektor jasa (7.015 orang).

➤ Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 40,35 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 2,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status pekerja buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 2,2 persen poin. Pada Tahun 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 525.720 orang (57,57 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 387.406 orang (42,43 persen). Dibandingkan Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 10.024 orang.

➤ Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Pada tahun 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 46,11 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 4,56 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Tahun 2023. Dibandingkan dengan Tahun 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah mengalami peningkatan persentase sebesar 0,60 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan universitas (Diploma IV, S1, S2, S3) mengalami penurunan persentase, sebesar 0,44 persen poin.

Lebih jelasnya untuk melihat karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17 Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024**

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Agt 2022 – Agt 2023		Perubahan Agt 2023 – Agt 2024	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin <sup>1)</sup>	orang	persen poin <sup>1)</sup>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Lapangan Pekerjaan Utama</b>										
A. Pertanian	152.453	20,58	165.532	19,02	178.310	19,53	13.079	-1,56	12.778	0,51
B. Manufaktur	249.979	33,75	274.234	31,51	297.298	32,56	24.255	-2,24	23.064	1,05
C. Jasa	338.207	45,66	450.503	49,47	437.518	47,91	92.296	3,81	7.015	-1,56
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Berusaha sendiri	197.371	26,65	210.495	24,19	186.796	20,46	13.124	-2,46	-23.699	-3,73
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	70.986	9,58	84.073	9,66	97.687	10,70	13.087	0,08	13.614	1,04
Berusaha dibantu buruh tetap	17.903	2,42	22.572	2,60	18.968	2,08	4.669	0,18	-3.604	-0,52
Buruh/karyawan/pegawai	291.364	39,34	332.001	38,15	368.438	40,35	40.637	-1,19	36.437	2,2
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	119.814	16,18	144.043	16,55	153.216	16,78	24.229	0,37	9.173	0,23
Pekerja keluarga/tak dibayar	43.201	5,83	77.085	8,86	88.021	9,64	33.884	3,03	10.936	0,78
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
<b>Status Pekerjaan Formal/Informal</b>										
Formal	309.267	41,76	354.573	40,74	387.406	57,57	45.306	-1,02	32.833	16,83
Informal	431.372	58,24	515.696	59,26	525.720	42,43	84.324	1,02	10.024	-16,83
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
<b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan</b>										
SD ke Bawah	352.722	47,62	396.043	45,51	421.026	46,11	43.321	-2,11	24.983	0,60
Sekolah Menengah Pertama	150.531	20,32	187.853	21,59	177.566	19,45	37.322	1,27	-10.287	-2,14
Sekolah Menengah Atas	109.707	14,81	121.680	13,98	152.214	16,67	11.973	-0,83	30.534	2,69
Sekolah Menengah Kejuruan	81.077	10,95	111.356	12,80	106.589	11,67	30.279	1,85	-4.767	-1,13
Diploma I/II/III	9.871	1,33	9.829	1,13	14.122	1,55	-42	-0,2	4.293	0,42
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	36.731	4,96	43.508	5,00	41.609	4,56	6.777	0,04	-1.899	-0,44
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	

Sumber: Ketenagakerjaan KBB , BPS 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kab. Bandung Barat Tahun 2024 sebesar 6,70 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 1,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (8,11 persen).

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 6,59 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,92 persen. Jika dibandingkan tahun 2023, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,17 persen poin sedangkan yang perempuan mengalami penaikan, sebesar 0,08 persen poin.

**Tabel 3.18 Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 (Agustus)**

Karakteristik Pengangguran	Agustus	Agustus	Agustus	Perubahan	Perubahan	
	2022	2023	2024	Agt 2022 – Agt 2023	Agt 2023 – Agt 2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,63	8,11	6,70	-1,52	-1,41	
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-laki	6,54	8,76	6,59	2,22	-2,17	
- Perempuan	15,98	6,84	6,92	-9,14	0,08	

*Sumber: Ketenagakerjaan KBB , BPS 2024*

### 3.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 - 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 3.19 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024**

Persentase Penduduk Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	
		(rupiah/kapita/bulan)	Miskin (persen)
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,3
2022	393.956	183,70	10,82
2023	426.355	179,43	10,52
2024	455.325	179,70	10,49

*Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.*

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2020 –2024, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.93.113,- dari Rp. 362.212,- per kapita per bulan pada Tahun 2020 menjadi Rp.455.325,- per kapita per bulan pada Tahun 2024.

Capaian tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 10,49 persen dari target 10,52 persen. Bila dilihat dari pencapaian tahun 2023 keberhasilan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 turun sebesar 0,03 persen. Walaupun mengalami penurunan, angka kemiskinan ini masih terbilang tinggi masih berada pada skala 2 digit bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat sebesar 7,46 persen bahkan di Kab/Kota di Jawa Barat angka kemiskinan Kab. Bandung Barat masih berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya.

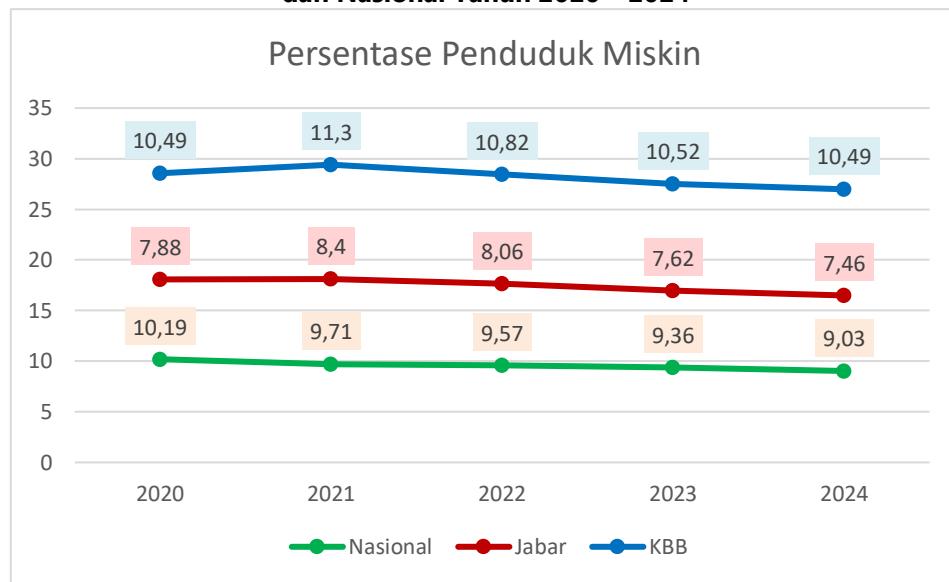
**Tabel 3.20 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)**

Peringkat	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Depok	2.45	2.58	2.53	2.38	2,34
2	Kota Bandung	3.99	4.37	4.25	3.96	3,87
3	Kota Bekasi	4.38	4.74	4.43	4.10	4,01
4	Kota Cimahi	5.11	5.35	5.11	4.66	4,39
5	Bekasi	4.82	5.21	5.01	4.93	4,80
6	Kota Banjar	6.09	7.11	6.73	6.14	5,85
7	Bandung	6.91	7.15	6.80	6.40	6,19
8	Kota Bogor	6.68	7.24	7.10	6.67	6,53
9	Sukabumi	7.09	7.70	7.34	7.01	6,87
10	Ciamis	7.62	7.97	7.72	7.42	7,05
11	Bogor	7.69	8.13	7.73	7.27	7,20
12	Kota Sukabumi	7.70	8.25	8.02	7.50	7,39
13	Karawang	8.26	8.95	8.44	7.87	7,86
14	Purwakarta	8.27	8.83	8.70	8.46	8,41

Peringkat	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
15	Pangandaran	8.99	9.65	9.32	8.98	8,75
16	Kota Cirebon	9.52	10.03	9.82	9.16	9,02
18	Sumedang	10.26	10.71	10.14	9.36	9,10
17	Subang	9.31	10.03	9.75	9.52	9,49
19	Garut	9.98	10.65	10.42	9.77	9,68
20	Cianjur	10.36	11.18	10.55	10.22	10,14
21	Tasikmalaya	10.34	11.15	10.73	10.28	10,23
<b>22</b>	<b>Bandung Barat</b>	<b>10.49</b>	<b>11.30</b>	<b>10.82</b>	<b>10.52</b>	<b>10,49</b>
23	Cirebon	11.24	12.30	12.01	11.20	10,82
24	Majalengka	11.43	12.33	11.94	11.21	11,00
25	Kota Tasikmalaya	12.97	13.13	12.72	11.53	11,10
26	Kuningan	12.82	13.10	12.76	12.12	11,88
27	Indramayu	12.70	13.04	12.77	12.13	11,93
<b>Provinsi Jawa Barat</b>		<b>7.88</b>	<b>8.40</b>	<b>8.06</b>	<b>7.62</b>	<b>7,46</b>
<b>Nasional</b>		<b>10.19</b>	<b>9.71</b>	<b>9.57</b>	<b>9.36</b>	<b>9,03</b>

Sumber : Data Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2020-2025, diolah.

**Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024**



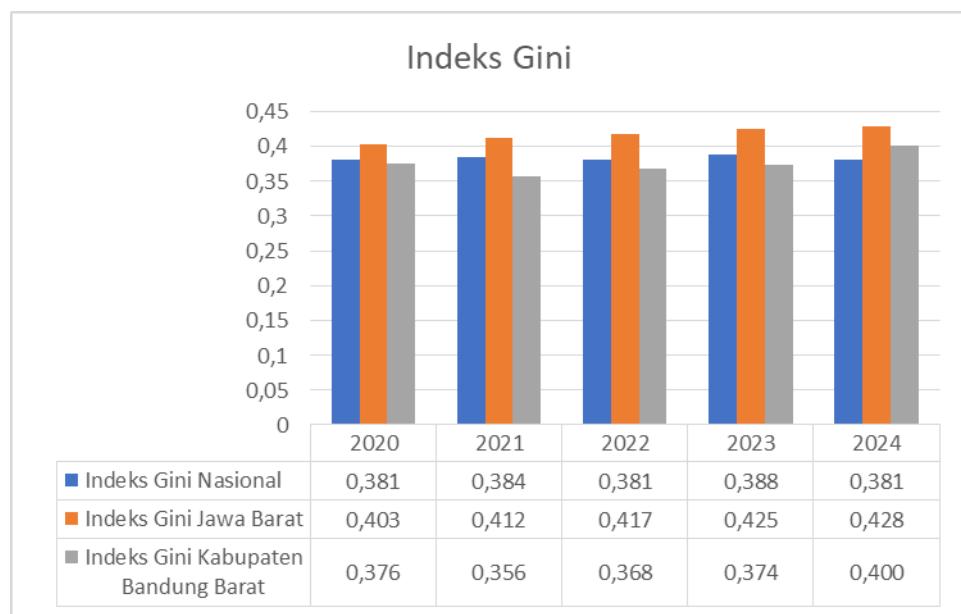
Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

### 3.1.1.7 Gini Rasio

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024 berflukktif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ( $<0,4$ ). Pada tahun 2024 gini rasio dengan capaian tertinggi yaitu sebesar 0,400 poin bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tetapi capaian ini masih dibawah capain indeks Gini Jabar sebesar 0,421. Namun capaian indek gini di tahun 2024 walaupun masih kategori rendah, Pemerintah Daerah harus bertindak cepat karena jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang. Nilai indeks pada grafik berikut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah atau sama dengan 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

**Gambar 3.3 Grafik Capaian Gini Rasio  
Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020– 2024**



*Sumber : BPS 2020-2024, diolah*

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2025**

#### **3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional**

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai. Tahun 2025 menghadirkan tantangan dan prospek ekonomi nasional yang beragam. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap stabil, namun dengan tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, resesi global, dan ketidakpastian geopolitik. Secara domestik, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi antara lain daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketergantungan terhadap impor pangan. Daya beli masyarakat, terutama pada kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah, mengalami tekanan.

Pada triwulan I Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh resilien 4,87% (yoy) dan diproyeksikan ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali, konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen

Kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bantuan sosial serta subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut.

### **3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat**

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategorikan memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota .

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja. Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech
4. Penguatan koneksi dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
  - a. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA) pada seluruh sektor perizinan;
  - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
  - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan
  - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Tantangan pada sektor industri:
  - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
  - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
  - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. Substitusi bahan baku impor;
  - e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
  - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
  - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan

- b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
- a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
  - b. Pengembangan Desa Wisata;
  - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional.
  - d. Percepatan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)
  - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
- a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
  - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
  - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
  - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
  - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
- a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
  - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
  - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan
  - d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan
  - e. Peningkatan produksi pertanian potensi ekspor.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
  - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
  - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi Jawa Barat tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.21 Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Proyeksi 2025
1	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	4,95	4,96 – 5,37
2	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	56.080	57.280
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,75	6,42 – 6,99
4	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,46	5,85 – 6,46
5	Gini Rasio	0,428	0,419 – 0,425
6	Indeks Modal Manusia	-	0,55
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	6,61

*Sumber: RKPD Prov. Jabar 2025*

Proyeksi ini tidak terlepas dari pemantapan perekonomian Jawa Barat di tengah ketidakpastian global melalui upaya perluasan pasar ekspor, serta penguatan mitigasi dampak perubahan iklim pada kinerja sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penetapan target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, dimana target optimisme penyerapan tenaga kerja yang tercermin pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 adalah 6,42-6,99 persen. Berdasarkan capaian historis, tingkat pengangguran terbuka memiliki arah dan derajat perubahan yang hampir identik dengan tingkat kemiskinan, oleh karena itu target tahun 2025 juga terbilang optimis dalam rentang 5,85 – 6,46 persen, dimana target ini sangat optimis mengingat capaian 2024 yang masih pada tingkat 6,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serapan tenaga kerja yang meningkat, dan penurunan kemiskinan, diharapkan juga dapat mendorong penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Melihat capaian historis Indeks Gini yang terus meningkat, target penurunan ketimpangan tahun 2025 ke tingkat 0,419 – 0,425 dinilai optimis. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerataan pembangunan dan investasi di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerataan kedua aspek ini penting mengingat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Barat masih berfokus di Kawasan industri besar. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025.

### **3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Bandung Barat**

Dalam rangka perencanaan tahun 2025 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Kondisi ekonomi tahun 2025 diupayakan dalam rangka Stabilitas Ekonomi Daerah, seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan ekonomi secara nasional dan regional Jawa Barat serta upaya peningkatan pada sektor-sektor potensial penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dan pariwisata. Sedangkan tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2025, meliputi:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung Barat pada 3 (tiga) tahun terakhir terutam pada sektor-sektor unggulan pertanian dan perdagangan. Pada sektor pertanian hal ini dipengaruhi karena belum optimalnya antisipasi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi pertanian serta semakin berkurangnya lahan pertanian yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna pada bidang pertanian dalam meningkatkan produktifitas. Sedangkan pada sektor perdagangan, melemahnya daya beli masyarakat yang hanya focus pada pemenuhan kebutuhan pokok makanan turut mempengaruhi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Tantangan daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin sangat rentan terhadap inflasi barang dan jasa, sehingga perlu upaya pengendalian inflasi dimana harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global maupun faktor internal. Hal ini ditunjang dengan belum optimalnya stabilitas pasokan, sistem rantai pasok dan perlindungan sosial yang belum tepat sasaran
3. Tingkat persaingan yang tinggi dalam menarik investasi karena masih rendahnya daya saing iklim investasi dan daya saing ketenagakerjaan di Kab. Bandung Barat serta pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
4. Tantangan pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir; meningkatkan kontribusi serta produktifitas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta tantangan pada bidang koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif dan koperasi berkualitas dengan adanya kebijakan pembentukan koperasi merah putih di setiap desa;

5. Tantangan dalam meningkatkan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan, karena berdasarkan data rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menghabiskan 607,96 ribu rupiah untuk konsumsi makanan dan 522,52 ribu rupiah untuk konsumsi bukan makanan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan pada pengeluaran makanan (-2,72 persen) lebih kecil dibanding pengeluaran bukan makanan (3,57 persen). Hal ini berimbas pada kontribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan (53,78 persen) yang lebih besar dibanding pengeluaran bukan makanan (46,22 persen) dari total pengeluaran secara keseluruhan. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah.
6. Tantangan pada sektor pariwisata adalah pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata serta promosi destinasi pariwisata baru dan pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
7. Tantangan pada sektor perdagangan antara lain perdagangan yang harus berorientasi ekspor dan meningkatkan cakupan bisnisnya, standarisasi pasar rakyat ber-SNI, memastikan Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok terjangkau melalui distribusi yang merata;
8. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura adalah Ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen, meningkatkan produksi komoditas bahan pangan dan hortikultura impor sehingga dapat meningkatkan produk pangan lokal yang berkualitas terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis.
9. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah dengan jumlah angkatan kerja yang besar tidak dibarengi oleh daya saing kompetensi tenaga kerja hal ini terlihat dari komposisi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 525.720 orang (57,57 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 387.406 orang (42,43 persen) dan penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 46,11 persen.

Prospek perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penormalan bahkan cenderung meningkat seiring dengan normalnya kembali seluruh aktifitas perekonomian masyarakat, walaupun harus tetap diantisipasi dengan adanya isu global serta menurunnya daya beli masyarakat.

Hal ini ditandai dengan UMKM akan lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*), Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Kecenderungan meningkat ini diharapkan akan terus berlangsung sehingga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat berada dikisaran 5-6%. Secara umum, pada tahun 2025 diharapkan perekonomian semakin stabil dan cenderung meningkat, dengan proyeksi kinerja capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.22 Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Proyeksi Target Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	5,12
2	Laju Inflasi	1,46	1,01 - 2,00
3	PDRB harga berlaku (milyar)	61.236,36	61.540,52
4	PDRB harga Konstan (milyar)	36.793,68	36.814,20
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	32.500,00	33.689,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70	6,58
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,49	9,71
8	Indeks Gini (poin)	0,400	0,369

Sumber: \*2024 BPS,

\*\*Target 2025 Proyeksi RPJMD tahun 2025-2029, Bappelitbangda

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dijaga untuk tetap stabil menuju pemantapan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan provinsi. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Konstruksi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2025.

Proyeksi distribusi presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2025 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi berikut:

**Tabel 3.23 Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 - 2025 (persen)**

	Lapangan Usaha	Capaian Tahun 2024	Target (hasil proyeksi) Tahun 2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,63	12,68
B	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,94
C	Industri Pengolahan	40,85	41,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	0,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,92	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,38	12,34
H	Transportasi dan Pergudangan	6,20	6,24
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,23	5,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	2,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	0,93
L	<i>Real Estate</i>	1,98	1,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,53	0,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,14	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,45	3,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,56
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,16	1,07

Sumber: \* 2024 BPS,

\*\*2025 Proyeksi RPJMD tahun 2025-2029, Bappelitbangda

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

#### 3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni

1. kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global,
2. koordinasi kebijakan moneter dan fiskal,
3. upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM,
4. dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah,
5. upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan,
6. dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta
7. dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melata belakangi kebijakan tahun 2025 antara lain:

1. Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
4. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
5. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
6. Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
7. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
8. Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat**

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
  - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
  - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
  - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
  - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
  - f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
  - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
  - i. Peningkatan perhutanan sosial;
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
- a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
  - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
  - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
- a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
  - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
  - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
  - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
  - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
  - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
  - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
  - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas;
  - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
  - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
  - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
  - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
  - h. pembentukan wirausaha baru;
  - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;

- b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
- c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

### **3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan nilai investasi dan daya saing usaha, terkendalinya tingkat kemiskinan, meningkatnya ketahanan pangan, dan peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

- 1. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah, melalui:
  - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi
  - b. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
  - c. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi
  - d. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan & ekonomis
  - e. Pengendalian kesehatan ternak
  - f. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
  - g. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - h. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
  - i. Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif

- j. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
  - k. Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
  - l. Peningkatan Sarana Prasarana jaringan distribusi perdagangan
  - m. Penguatan pengendalian inflasi daerah serta Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  - n. Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
  - o. Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
  - p. Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
  - q. Peningkatan koperasi aktif dan sehat
  - r. Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi
  - s. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
  - t. Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan UMKM
  - u. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis UMKM
  - v. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
  - w. Peningkatan produktivitas BUMD
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta mengurangi pengangguran, melalui:
- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perluasan penyediaan bantuan sosial pendidikan, kesehatan, pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marjinal, rentan,
  - b. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran melalui pengelolaan Data masyarakat Miskin
  - c. Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dalam mencegah terjadinya kemiskinan baru
  - d. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
  - e. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- f. Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja
- g. Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
- h. Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor potensial

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2025 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses bottom up dan top down serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 ini tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu serta berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan RKP Tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

### **3.2.1 Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasi kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **a. Pajak Daerah**

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
- Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor

#### **b. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (idle money), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian.

### **2. Pendapatan Dana Transfer Pusat ke Daerah**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya Struktur Pendapatan Daerah berpedoman berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2025, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.24 Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024, Realisasi 2024, APBD 2025 dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025**

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)				
		APBD 2024	Realisasi 2024	APBD 2025	APBD 2025 parsial 2	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.452.767.649.123</b>	<b>3.410.264.951.636</b>	<b>3.465.066.875.614</b>	<b>3.367.314.144.635</b>	<b>3.367.314.144.635</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>786.934.566.871</b>	<b>799.932.118.379</b>	<b>952.021.711.556</b>	<b>955.021.711.556</b>	<b>955.021.711.556</b>
4.1.01	Pajak Daerah	571.000.000.000	590.254.784.373	741.518.755.652	741.518.755.652	741.518.755.652
4.1.02	Retribusi Daerah	17.789.533.900	14.701.304.603	194.607.048.593	197.607.048.593	197.607.048.593
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.306.239.012	1.253.070.525	1.253.070.525	1.253.070.525
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	196.891.962.446	193.669.790.391	14.642.836.786	14.642.836.786	14.642.836.786
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.665.833.082.252</b>	<b>2.610.332.833.257</b>	<b>2.513.045.164.058</b>	<b>2.412.292.433.079</b>	<b>2.412.292.433.079</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.261.702.720.000	2.221.997.027.103	2.335.113.284.000	2.204.897.561.000	2.204.897.561.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	404.130.362.252	388.335.806.154	177.931.880.058	207.394.872.079	207.394.872.079
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>3.452.767.649.123</b>	<b>3.410.264.951.636</b>	<b>3.465.066.875.614</b>	<b>3.367.314.144.635</b>	<b>3.367.314.144.635</b>

Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat perbedaan pada pos proyeksi lain-lain Pad yang sah dan Retribusi dikarenakan perubahan rekening belanja BLUD dan penyesuaian pendapatan dari opsen Pajak PKB. pada Pendapatan Transfer dilakukan penyesuaian karena berkaitan dengan penerimaan dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat antara lain Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Tambahan. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penangulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

### **3.2.2 Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah**

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi prinsip money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Modal, Dana cadangan pembiayaan dan bunga untuk. Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Sedangkan penyelenggaraan Urusan pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.

3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pilkada serentak Tahun 2025, Dana cadangan dialokasikan untuk seluruh tahapan dalam pilkada serentak tahun 2025 sehingga alokasinya dimulai sejak tahapan awal pilkada tahun 2023, Tahapan Pelaksanaan Tahun 2025 dan tahapan akhir tahun 2025.

Belanja daerah dialokasikan kepada 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II adalah untuk program-program bupati terpilih sesuai arah prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 3.364.310.953.231,00 Berkurang dari belanja murni tahun 2025 sebesar Rp. 3.465.066.875.614,00. di karenakan adanya penyesuaian DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, berikut Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025:

**Tabel 3.25 Rencana Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025**

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)		
		APBD 2025	APBD 2025 parsial 2	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.465.066.875.614</b>	<b>3.364.314.144.635</b>	<b>3.364.310.953.231</b>
5,1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.597.763.043.728</b>	<b>2.565.139.706.735</b>	<b>2.567.905.746.774</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.507.786.175.565	1.510.389.853.729	1.510.490.979.326
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.652.368.163	1.018.823.780.985	1.021.488.695.427
5.1.05	Belanja Hibah	31.104.500.000	32.346.072.021	32.346.072.021
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.220.000.000	3.580.000.000	3.580.000.000
5,2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>326.228.674.356</b>	<b>258.096.986.920</b>	<b>255.330.048.927</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.269.807.140	3.269.807.140	3.269.807.140
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.187.963.634	114.009.183.320	114.221.394.121
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.198.800.935	66.224.959.255	63.036.930.461
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.325.579.583	60.346.514.141	60.246.514.141
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.361.224.900	13.361.224.900	13.361.224.900
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.298.164	885.298.164	1.194.178.164
5,3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>53.772.545.881</b>	<b>53.772.545.881</b>	<b>53.772.545.881</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.772.545.881	53.772.545.881	53.772.545.881
5,4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>487.302.611.649</b>	<b>487.302.611.649</b>	<b>487.302.611.649</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	62.697.901.449	62.697.901.449	62.697.901.449
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.604.710.200	424.604.710.200	424.604.710.200
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>3.465.066.875.614</b>	<b>3.364.314.144.635</b>	<b>3.364.310.953.231</b>

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan didapat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 Sebesar Rp. 78.230.964.440 terdiri dari KAS BUD Rp. 62.162.729.892, KAS BLUD Rp. 13.256.878.492, KAS BOS Rp. 15.334.411 dan KAS BOK Rp. 2.796.021.645.

Berikut ini ditampilkan mengenai pembiayaan daerah tahun 2024 dan pembiayaan tahun 2025.

**Tabel 3.26 Pembiayaan Daerah RKPD Perubahan Tahun 2025**

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)	
		APBD 2025 APBD 2025 parsial 2	P-RKPD 2025
1	2	3	4
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0	<b>78.247.598.644,00</b>
6,1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	0	<b>78.247.598.644,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	78.247.598.644,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		0	<b>78.247.598.644,00</b>

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD). RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang disusun di tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Dalam perkembangannya, sehubungan pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, diperlukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran periode tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029. Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2025 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025; (2) Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah; (3) Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana

sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana; (4) Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas; (5) Dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan tahun berjalan s.d triwulan I tahun 2025; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025.

Pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan. Pernyataan tujuan pembangunan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, serta sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Bandung Barat memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dirancang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk mewujudkan Bandung Barat **“AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)** sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian **8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat** yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025-2029 serta sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian **Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata)** yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

#### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan indonesia setara negara maju ditahun 2045. Dalam mencapai Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025–2029 ditetapkan **8 Misi (Asta Cita)**. Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2025–2029, ditetapkan 8 (Asta) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang selanjutnya 8 (Asta) agenda pembangunan tersebut ditetapkan menjadi prioritas nasional dalam RKP Tahun 2025, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya 8 (Asta) agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 17 program prioritas presiden dan wakil presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan dan energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif -karakteristik-mandiri lainnya

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumberdaya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga

Untuk selanjutnya dirumuskan kedalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins, yaitu:

1. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah- sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu- kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai pembangunan nasional yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2025**

**TEMA DAN PENEKANAN KEBIJAKAN  
RKP TAHUN 2025**



Tema RKP tahun 2025 adalah **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Tema pembangunan tersebut merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dan cita cita besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 1 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 – 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 – 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 – 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

*Sumber: RKP Tahun 2025*

#### **4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat.**

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Jawa Barat tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 adalah: **”Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata”**.

Visi ini diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa, yaitu:

1. Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
2. Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksplotatif
3. Misi Ketiga Yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4. Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran yaitu
  - a. Meningkatnya derajat kesehatan individu;
  - b. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;

- c. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
  - d. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan
  - e. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:
- a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
  - b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
  - c. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
  - d. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif
3. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
  - b. Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan calon tenaga kerja
  - c. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
4. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran
- a. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;
  - b. Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; dan
  - c. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
5. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya penerapan Iptek, riset dan inovasi dalam pembangunan; dan
  - b. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan
6. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif

Penyesuaian target, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2025**

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
1	Indeks Modal Manusia	Poin	-	0,55
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,72
4	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	-	61,30
5	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin	45,29	48,19
6	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	(Juta Rupiah)	56,080	57,280
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,75	6,42 – 6,99
8	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,46	5,85 – 6,46
9	Indeks Gini	Poin	0,428	0,419 – 0,425
10	Penurunan Emisi GRK (%)	Persen	-	6,61

Sumber: BPS Prov. Jabar dan RKPD Prov. Jabar 2025

#### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat**

Tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk mengetahui keberhasilan dalam tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Keadaan/kondisi Kabupaten Bandung Barat yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Kabupaten Barat 2025– 2029 merupakan arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dengan kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan dalam mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah : **BANDUNG BARAT AMANAH” (Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis)** yang mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan seluruh potensi sumber daya manusia yang dapat mengembangkan kepercayaan masyarakat, makna dan pokok-pokok visi AMANAH dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029**

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>“AMANAH”</b>	<b>AGAMIS</b>	Nilai Religius	<b>AGAMIS</b> mengandung makna bahwa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik
	<b>MAJU</b>	Pengembangan Ekonomi	<b>MAJU</b> mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan Bandung Barat di kawasan Bandung Raya dan Jawa Barat
	<b>ADAPTIF</b>	Tata Kelola Pemerintahan	<b>ADAPTIF</b> mengandung makna pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Visi Adaftif dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespons perubahan secara cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
	<b>NYAMAN</b>	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	<b>NYAMAN</b> mengandung makna bahwa pembangunan di Bandung Barat dengan segala potensinya diarahkan dalam rangka mempercepat dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana serta tidak merusak lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
	<b>ASPIRATIF</b>	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<b>ASPIRATIF</b> mengandung makna potensi penduduk Bandung Barat sebagai modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat.
	<b>HARMONIS</b>	Kondisi Harmonis di Masyarakat dan Kearifan Budaya Lokal	<b>HARMONIS</b> berarti masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras berlandaskan kearifan budaya lokal serta membangun kondisi harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi diterjemahkan kedalam 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029 yang dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan  
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029**

<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>	<b>Langkah Penjabaran</b>
1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kualitas sarana Peribadatan
		Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)
		Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah
		Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
		Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
		Meningkatkan Profesionalisme ASN
		Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan berbasis teknologi dan informasi
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
		Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
		Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
		Ketahanan Daerah terhadap bencana, perubahan iklim dan kemandirian pangan
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan kondusivitas wilayah
		Meningkatkan Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
		Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa
		Meningkatkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Ranwal RPMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2025-2029. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) PD. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhhlak, dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya Masyarakat yang Berakhhlak
  - 2) Kesehatan yang berkualitas untuk semua
  - 3) Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, dengan sasaran:
  - 4) Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:
  - 5) Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
  - 6) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
  - 7) Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja
4. Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
  - 8) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif
  - 9) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
  - 10) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah, dengan sasaran:
  - 11) Pemerataan Saprasi Perumahan dan Permukiman
  - 12) Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh, dengan sasaran:
  - 13) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
  - 14) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan

7. Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran:
  - 15) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan
8. Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal, dengan sasaran:
  - 16) Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
  - 17) Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator beserta target pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029**

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
I	<b>Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhhlak dan Berkarakter</b>									
1	<b>Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhhlak</b>	1 <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Poin	70,77	71,33	72,14	72,46	73,27	73,58	73,90
	1 Meningkatnya Masyarakat yang Berakhhlak	1 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin		60	64	68	72	76	80
	2 Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2 Umur Harapan Hidup	Poin	75,06	75,28	75,62	75,80	76,14	76,32	76,86
		3 Prevalensi Stunting	% SSGI	25,10	22,00	19,97	18,32	17,89	16,25	15,81
	3 Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4 Harapan Lama Sekolah	Poin	12,00	12,01	12,03	12,04	12,06	12,10	12,13
		5 Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,24	8,26	8,27	8,28	8,30	8,31	8,33
2	<b>Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas</b>	2 <b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	Poin	6,12	6,91	63,11	64,13	65,01	65,78	66,48
	4 Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00	71,90	72,50	73,20	74,00
		7 Indeks Pembangunan Pemuda	Poin		43,85	44,20	44,64	44,89	45,00	45,20
II	<b>Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah</b>									
3	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>	3 <b>PDRB per Kapita (ADHB)</b>	Milyar	32,500	33,689	35,249	36,809	38,369	39,929	40,880
		4 Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	Milyar	2,16	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20	2,21
	5 Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,12	5,18	5,26	5,48	5,86	6,05
		9 Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin							
		10 Pembentukan Modal Tetap Bruto	Poin	12.639,69	13.299,69	13.930,38	14.561,07	15.191,76	15.822,46	16.442,50
		11 Tingkat Inflasi	%	1,46	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00
	6 Menurunnya Angka Kemiskinan	12 Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,71	9,31	8,92	8,52	8,12	7,99

		dan Ketimpangan Berkurang	13	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367	0,366	0,364	0,363	0,360	
	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	6,40	6,05	5,89	5,40	5,03	
III	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel</b>												
4	<b>Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adatif dan Berorientasi Pelayanan</b>			5	<b>Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)</b>	Poin		3,26	3,30	3,46	3,77	3,93	4,05
	8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori		74,85	75,96	77,06	79,06	80,17		
	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks Pemerintahan Digital	Poin		1,0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.00	
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94	86,38	87,83	88,98	90,28	91,20	
IV	<b>Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah</b>												
5	<b>Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasikan antar Wilayah</b>			6	<b>Indeks Infrastruktur</b>	Poin							
	11	Pemerataan Saprasi Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%		43,29	45,68	47,25	51,20	53,35	55,26	
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67	24,23	23,79	23,35	23,05	
V	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan</b>												
6	<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh</b>			7	<b>Penurunan Intensitas Emisi GRK</b>	Ton CO2eq/ 210 IDR Milyar		2,63	2,94	3,28	3,69	4,24	4,65
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60		
			21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq		116.125,67	232.251,34	348.377,01	464.502,68	580.628,35		

	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68	80,38	79,80	78,84	78,61
VI	<b>Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>											
7	<b>Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah</b>		8	Indeks Harmoni	Poin		6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00
	15	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin		58,48	59,42	59,85	60,79	61,22	62,91
8	<b>Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal</b>		9	Indeks Desa	Poin							
	16	Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa	24	Indeks Desa	Poin							
	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50	59,25	59,89	60,44	60,92

Sumber : Ranwal RPJMD KBB Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target, tujuan, dan sasaran RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Proyeksi Target Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	5,12
2	Laju Inflasi	1,46	1,01 - 2,00
3	PDRB harga berlaku (milyar)	61.236,36	61.540,52
4	PDRB harga Konstan (milyar)	36.793,68	36.814,20
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	32.500,00	33.689,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70	6,58
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,49	9,71
8	Indeks Gini (poin)	0,400	0,369

*Sumber : Realisasi BPS KBB  
Target RPJMD 2025-2029*

Penyesuaian target tujuan dan sasaran pada perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan mempertimbangkan dan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025 – 2029 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

#### **4.1.4 Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Nasional Tahun 2025**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah dalam upaya penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Bandung Barat. Keselarasan tujuan sasaran pembangunan daerah dengan Agenda Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan 8 Agenda Nasional**

Agenda Nasional (Asta Cita)		Tujuan Pembangunan Kab. Bandung Barat		Sasaran Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Kab. Bandung barat	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia		
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh	1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional	15	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan
				2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan
				3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
				4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air		
				5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan		
				6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru		
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	5	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah	1	Terwujudnya pemgembangan infrastruktur yang berkelanjutan	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman
				2	Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB		
				3	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas		
				4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata		
				5	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif		
4	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan dan pemuda (gen. milenial dan gen z) serta penyandang disabilitas	1	Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlik	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas	3	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	2	Terwujudnya kesehatan untuk semua	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua
				3	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan
				4	Menguatnya iptek, inovasi dan produktifitas tenaga kerja	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

			5	Meningkatnya prestasi olahraga indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan		
			2	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global		
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	3	1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
		8	2	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
			3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	16	Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
			4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	4	1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, tidak memihak serta sistem politik yg fungsional		
			2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	9	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif
			3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
			4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			5	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan seumber dan pengembangan inovasi pembiayaan		
			6	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		

8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	7	Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Konduktivitas Wilayah	1	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlik Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
---	--	---	---	---	---	---	--

*Sumber : RPJMN 2025-2029 dan Ranwal RPJMD KBB 2025-2029, diolah*

#### **4.1.5 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat**

Selain berpedoman terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bandung Barat juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat, melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Selain itu penyelarasan dilakukan terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran **Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata)** yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilihat secara parsial, karena pada prinsipnya untuk satu tujuan dan sasaran provinsi Jawa Barat bisa didukung oleh beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Secara rinci berikut keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat**

Agenda Nasional (Asta Cita)		Tujuan Pembangunan Kab. Bandung Barat		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Sasaran Pembangunan Kab. Bandung barat	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Caguer, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer	1	Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak	1	Meningkatnya derajat kesehatan individu;	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak
		2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	2	Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua
				3	Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;	3	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
				4	Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan
				5	Terbentuknya individu kreatif dan inovatif		
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	8	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal	1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
				2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;	16	Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
				3	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
				4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif		
3	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja;	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
				2	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan calon tenaga kerja	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja
				3	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan		
4	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan	5	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah	1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;	11	Pemerataan Saprasi Perumahan dan Permukiman
		6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh	2	Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
				3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
						14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan

5	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi		Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah	1 2	Meningkatnya penerapan Iptek, riset dan inovasi dalam pembangunan; Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	9 15	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan
6	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan	4	Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adatif dan Berorientasi Pelayanan	1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	8 10	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

*Sumber : RPJMD Jabar 2025-2029 dan Ranwal RPJMD KBB 2025-2029, diolah*

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

##### **4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Tema RKP tahun 2025 adalah **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Tema pembangunan tersebut merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dan cita cita besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan dan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional dan Sasaran pembangunan tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dengan sasaran Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia dengan indikator (a) indeks Demokrasi Indonesia (b) Indeks Hak Asasi Manusia.
- 2) Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dengan sasaran

1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator
  - a. Asia Power Index (Military Capability),
  - b. Asia Power Index (Diplomatic Influence),
  - c. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)
  - d. Golbal Cybersecurity Index
  - e. Indeks keamanan laut nasional
2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
  - f. Indeks Ketahanan Pangan
  - g. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)
3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
  - h. Indeks ketahanan energi
  - i. Porsi EBT dalam bauran energi Primer (%)
4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, da air (FEW nexus)
  - j. Indeks ketahanan air nasional
  - k. Kapasitas tampungan air
  - l. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
  - m. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan
  - n. Posisi ekonomi syariah indonesia ditingkat global (peringkat)
  - o. Indonesia Blue Economy index (IBEI)
  - p. Indeks daya saing digital tingkat global (peringkat)
6. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
  - q. Indeks ekonomi hijau
  - r. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
  - s. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif (%)
  - t. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan (%)
  - u. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
  - v. Indeks kualitas lingkungan hidup

- w. Indeks kualitas udara
  - x. Indeks kualitas air
  - y. Indeks kualitas lahan
  - z. Indeks kualitas air laut
- 3) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran
1. Terwujudnya pemgembangan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator a).stok infrastruktur terhadap PDB (%)
  2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan indikator:
    - a. Total aset sektor keuangan /PDB (%)
    - b. Aset perbankan/PDB (%)
    - c. Aset dana pensiun/PDB (%)
    - d. Aset asuransi/PDB (%)
    - e. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)
    - f. Total kredit/PDB (%)
    - g. Inklusi keuangan (%)
  3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dengan indikator:
    - h. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)
    - i. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
    - j. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
    - k. Rasio kewirausahaan (%)
  4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dengan indikator:
    - l. Rasio PDB pariwisata (%)
    - m. Devisa pariwisata (Miliar USD)
  5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif dengan indikator : o) proporsi PDB ekonomi kreatif.
- 4) Prioritas Nasional 4: memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas dengan sasaran
1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dengan indikator:
    - a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun(tahun)

- b. Harapan lama sekolah (tahun)
  - c. Rata rata nilai PISA (membaca, matematika, dan sains)
  - d. Rata rata nilai assesmen tingkat nasional (literasi membaca dan numerasi)
  - e. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (%)
  - f. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
  - g. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
2. Terwujudnya kesehatan untuk semua dengan indikator:
- h. Usia harapan hidup (UHH) (tahun)
  - i. Angka kelahiran total (total fertility rate (rata-rata kelahiran perwanita usia subur 15-49 tahun)
  - j. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
  - k. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
  - l. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
  - m. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
- n. Indeks pembangunan kualitas keluarga
  - o. Indeks perlindungan anak
  - p. Indeks pembangunan pemuda
  - q. Indeks ketimpangan gender
  - r. Indeks pembangunan gender
  - s. Mobilitas penduduk lanjut usia (%)
  - t. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas (%)
4. Menguatnya iptek, inovasi dan produktifitas tenaga kerja
- u. Peringkat indeks inovasi global
  - v. Tingkat pengangguran terbuka (%)
  - w. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)
  - x. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan )(%)
5. Meningkatnya prestasi olahraga indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat
- y. Jumlah perolehan medali emas pada olympic games
  - z. Jumlah perolehan medali emas pada paralympic games
  - aa. Peringkat pada asian games
  - bb. Peringkat pada asian para games

- cc. Peringkat pada SEA games
  - dd. Peringkat pada ASEAN para games
  - ee. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga.
- 5) Prioritas Nasional 5: melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan sasaran:
1. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan dengan indikator a) rasio PDB industri pengolahan (%)
  2. Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, dengan indikator:
    - b) biaya logistik (%PDB)
    - c) Pembentukan modal tetap bruto (%PDB)
    - d) Ekspor barang dan jasa (%PDB)
- 6) Prioritas Nasional 6 : membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dengan sasaran :
1. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan indikator:
    - a. Tingkat kemiskinan (%)
    - b. Tingkat kemiskinan ekstrem (%)
    - c. Proporsi penduduk kelas menengah (%)
    - d. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
    - e. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)
  2. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan indikator:
    - f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
  3. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan indikator
    - g. Persentasi desa mandiri (%)
  4. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan indikator
    - h. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
    - i. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)
- 7) Prioritas Nasional 7 : memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, dengan sasaran :
1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
    - a. Indeks pembangunan hukum
    - b. Indeks persepsi korupsi

- c. Indeks materi hukum
  - d. Indeks integritas nasional
  - e. Indeks integritas partai politik
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
- f. Indeks reformasi birokrasi nasional
  - g. Indeks pelayanan publik
  - h. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
  - i. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri
3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan indikator:
- j. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dengan indikator
- k. Return on Asset (ROA) BUMN (%)
5. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:
- l. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)
  - m. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (%)
6. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator:
- n. Tingkat inflasi
- 8) Prioritas Nasional 8 : memperkuat penyalarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dengan sasaran:
- 1. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
    - a. Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)
    - b. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
    - c. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
  - 2. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
    - d. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat**

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Jawa Barat tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Misi Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2029.

Program Prioritas Daerah didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD 2025-2029. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan) pada RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 prioritas pembangunan 25 (dua puluh lima) program prioritas daerah dengan tema pembangunan Jawaq Barat Tahun 2025 adalah penyiapan infrastruktur dasar dan penguatan fondasi pembangunan dengan focus pada penyediaan infrastruktur layanan dasar dan penyiapan peningkatan kapasita SDM melalui penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029**

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Fokus Pembangunan Tahap I (Tahun 2025)	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter unggul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan</li> <li>2) Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaaan daerah).</li> <li>3) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan</li> <li>4) Penyiapan program sekolah vokasi dan afiliasi dengan industri dan ekonomi potensial daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi;</li> <li>2) Program Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional;</li> <li>3) Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui;</li> <li>4) Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal;</li> <li>5) Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;</li> <li>6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)</li> </ol>
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lingkungan</li> <li>2) Riset dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lingkungan</li> <li>3) Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal &amp; nonfiskal serta deregulasi bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Selatan)</li> <li>4) Pemetaan potensi ekonomi lokal dan ekonomi inklusif masyarakat yang dapat terafiliasi dengan rantai ekonomi yang lebih luas</li> <li>5) Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar eksport/global.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7) Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;</li> <li>8) Program Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja;</li> <li>9) Program Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan</li> <li>10) Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;</li> <li>11) Program Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;</li> <li>12) Program Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;</li> <li>13) Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;</li> <li>14) Program Pengembangan Digitalisasi Sektor Ekonomi Strategis;</li> <li>15) Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan peningkatan kesejahteraan petani</li> </ol>

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Fokus Pembangunan Tahap I (Tahun 2025)	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi &amp; logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi)</li> <li>2) Pengembangan jaringan jalan pendukung konektivitas antar wilayah hingga pelosok</li> <li>3) Penanganan lanjut permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni</li> <li>4) Penyediaan sistem jaringan sanitasi dan air bersih hingga pelosok daerah sesuai dengan karakteristik wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan;</li> <li>17) Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah;</li> <li>18) Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;</li> <li>19) Program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Terpadu;</li> <li>20) Program Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>21) Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi;</li> <li>22) Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon</li> </ol>
Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan sistem meritokrasi dan identifikasi kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public</li> <li>2) Pelatihan dan pengembangan dasar-dasar pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berbasis</li> <li>3) clean and good governance</li> <li>4) Integrasi dan penataan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep satu data dan satu sistem informasi bersama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>23) Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional;</li> <li>24) Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;</li> <li>25) Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah</li> </ol>

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat**

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bandung Barat dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bandung Barat 2025 yaitu “Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Daerah”.

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, membutuhkan program yang tepat selanjutnya disebut program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik Cascading (penurunan kinerja). Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan 32 (tiga puluh dua) program prioritas untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan nomenklatur program menjadi 87 program prioritas serta untuk mendukung program prioritas pembangunan tahun 2025-2029 dengan lebih jelas pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat**

<b>No</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>No</b>	<b>32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>No</b>	<b>87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlaq dan berkarakter	1	Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan dan Pengelola Tempat Ibadah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
		2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi	6	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa	7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
		8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
		9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
		10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan	10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
		11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		12	Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	12	Program Pemenuhan Hak Anak	
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	13	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DKPP Dispernakan
		14	Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		15	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disparbud
		16		16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		17		17	Program Penyuluhan Pertanian	
		18		18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		19		19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		20	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Disperindag
		21		21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		22		22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		23	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah	23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop UKM
		24		24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
		25		25	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
		26	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	26	Program Pengembangan UMKM	Dinsos
		27		27	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		28		28	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		29	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	29	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Disnaker
		30		30	Program Pemberdayaan Sosial	
		31	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif	31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		32	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja	32	Program Rehabiliasi Sosial	IV-32
		33		33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	34	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Tapem Setda Bag. Hukum Setda
				35	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian Setda Bag. Adm Pemb. Steda Bag. Pengadaan Barjas
				36	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretariat DPRD Bappelitbangda
				37	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				38	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
				39	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				40	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				41	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				43	Program Pengelolaan Arsip	Disarpus
		19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan	44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		20	Meningkatkan Profesionalisme ASN	45	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		21	Penguatan Pembangunan Smartcity	46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		22	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan	47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfotik
				48	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				49	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				50	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				51	Program Pencatatan Sipil	
				52	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				53	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16 Kecamatan
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah	23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat	54	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		24	Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan	55	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				56	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
				57	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
				58	Program Pengembangan Permukiman	
				59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				60	Program Penyelenggaraan Jalan	
				61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	32 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	87 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup	62	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				63	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	
				64	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga	65	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
				66	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	67	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR
				68	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
				69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				70	Program Penanganan Bencana	Dinsos
				71	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
				72	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR
				73	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
				74	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
				75	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				76	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	Disdamkar
				79	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Bakesbangpol
				80	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		29	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	81	Program Penataan Desa	DPMD
				82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
		30	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa	84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16 Kecamatan
				85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		31	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	86	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
				87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

#### 4.2.4 Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sehingga diharapkan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Keselarasan Program Daerah terhadap Program Nasional menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan. Keselarasan program Nasional, di turunkan kedalam program-program yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat, selengkapnya keterkaitan dan keselarasan dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 4.11 Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat**

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Nasional		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia						
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan
				1	Mencapai swasembada pangan dan energi dan air	24	Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
				11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
						26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah			23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhhlak dan berkarakter	8	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	1	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah
				9	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
				10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas	4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
				17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES)
						6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi
						7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa
						8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan
						9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
						10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan
						32	Pemajuan Kebudayaan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	5	Pemberantasan kemiskinan Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani	11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital
				12	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa
				13	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif - karakteristik-mandiri lainnya	13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf
				14		14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
						15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat

						16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif
						17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja
						29	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
						30	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
						31	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	2	Penyempurnaan sistem penerimaan Negara	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
				3	Reformasi politik, hukum dan birokrasi	19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
				4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	20	Meningkatkan Profesionalisme ASN
				7	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	21	Penguatan Pembangunan Smartcity
						22	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah	3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah
						27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah

Sumber : RPJMN 2025-2029 dan Ranwal RPJMD KBB 2025-2029, diolah

#### 4.2.5 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sehingga diharapkan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

**Tabel 4.12 Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat**

Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhhlak dan berkarakter	1	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	1	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah
		6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2	Program Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional	2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
				3	Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui	3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah
				4	Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal	4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
				5	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES)
				6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)	6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi
						7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa
						8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan
						9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
						10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan
						16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif
						32	Pemajuan Kebudayaan
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploratif	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	7	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital
				8	Program Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri	12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa
				9	Program Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf
				10	Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
				11	Program Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
				12	Program Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja

				13	Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	30	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
				14	Program Pengembangan digitalisasi sektor Ekonomi Strategis		
				15	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan peningkatan kesejahteraan petani		
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas Wilayah	16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan	23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
		5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	17	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah	24	Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
				18	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
				19	Program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Terpadu	26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
				20	Program Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah
				21	Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi	29	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				22	Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	31	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
4	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	23	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
				24	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
				25	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	20	Meningkatkan Profesionalisme ASN
						21	Penguatan Pembangunan Smartcity
						22	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan
						28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan

Sumber : RPJMD Prov. Jabar 2025-2029 dan Ranwal RPJMD KBB 2025-2029, diolah

#### 4.3 Pelayanan Standar Pelayanan Minimal

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bagi warga negara.

Sebagaimana dimanatkan dalam aturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konversi Internasional. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota dimana menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu di muat dalam dokumen RPJMD dan RKPD, ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa penerapan SPM itu memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Sementara itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dan melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana terdapat 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diantaranya ialah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Adapun jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

#### 4.3.1 SPM BIDANG PENDIDIKAN

Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dengan melaksanakan 3 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 5 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pendidikan Dasar	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3	Pendidikan Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

### 4.3.2 SPM BIDANG KESEHATAN

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dengan melaksanakan 11 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
6	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
7	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
8	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
10	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
11	Pelayanan Kesehatan Balita		

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

### 4.3.3 SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

#### 4.3.4 SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 5 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

#### 4.3.5 SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 1 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan; oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan dan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 1 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.17 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

#### 4.3.6 SPM BIDANG SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.18 Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Sosial**

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

#### **4.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (149) disebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Kabupaten/Kota; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan. Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kabupaten Bandung Barat. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah. Gambaran Uraian dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.19 Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat**

<b>Bidang Urusan</b>	<b>Uraian Permasalahan</b>	<b>OPD Tujuan</b>	<b>Jumlah Usulan</b>
Kebudayaan	#Pokir Pelatihan dan bimbingan teknis SDM kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
Kebudayaan	#Pokir Bantuan Alat Kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30
Kelautan dan Perikanan	#Pokir Pelatihan Budaya Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	1
Kelautan dan Perikanan	#Pokir Bantuan Budidaya Ikan	Dinas Perikanan dan Peternakan	13
Kepemudaan dan Olahraga	#Pokir Pelatihan Wira Usaha Pemuda Pemula	Dinas Pemuda dan Olahraga	7
Kepemudaan dan Olahraga	#Pokir Penyediaan Sarana Prasana Olahraga Rekreasi Penunjang Pariwisata	Dinas Pemuda dan Olahraga	36
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Pokir Coaching Clinic dan Pendidikan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Pokir Bantuan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Pokir Fasilitasi Pendirian Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#Pokir Pengembangan Sentra/Klaster/Kelompok UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22
Lingkungan Hidup	#Pokir Prasarana Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	8
Pariwisata	#Pokir Bantuan Peralatan Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
Pariwisata	#Pokir Pelatihan dasar /workshop/seminar SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1

Pariwisata	#Pokir Pembangunan sarana infrastruktur Ruang Kreatif dan Prasarana Bantuan alat ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
Pariwisata	#Pokir Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelaku/Komunitas Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
Pariwisata	#Pokir Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata/destinasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13
Pariwisata	#Pokir Fasilitasi akses permodalan dan pendanaan UMKM Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir REHAB JEMBATAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir DRAINASE LINGKUNGAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir IRIGASI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir PRASARANA PERSAMPAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir MCK & IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir REHAB KIRMIR/TPT IRIGASI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir TPT JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	141
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Pokir REHAB JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	277
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	#Pokir Pembelajaran Sekolah Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	#Pokir Bantuan Modal PEKKA	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	18
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	#Pokir Pengembangan Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1
Perhubungan	#Pokir SARPRAS JALAN	Dinas Perhubungan	3
Perindustrian	#Pokir Sarana dan Prasarana Industri Kecil Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55
Pertanian	#Pokir Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3
Pertanian	#Pokir Korporasi Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan	3
Pertanian	#Pokir Pelatihan Budiaya Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan	4
Pertanian	#Pokir Alat dan Mesin Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15
Pertanian	#Pokir Bangunan Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17
Pertanian	#Pokir Pakan Ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan	20
Pertanian	#Pokir Pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26
Pertanian	#Pokir Bibit/Benih	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36
Pertanian	#Pokir Bantuan Budidaya Ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan	155
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	#Pokir Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9
Sosial	#Pokir Pembentukan Puskesos Desa	Dinas Sosial	1
Sosial	#Pokir Bantuan KUBE	Dinas Sosial	38
Tenaga Kerja	#Pokir Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja	5

Sumber: SIPD, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan triwulan I tahun 2025 dalam rangka penyesuaian visi, misi, arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1./640SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dalam RKPD tahun 2025 baik berupa pergeseran pagu kegiatan PD, penambahan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan alokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mencakup (1) program, kegiatan, sub kegiatan RKPD Murni Tahun Anggaran 2025, (2) pergeseran pagu program, kegiatan dan sub kegiatan PD (3) penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif dan (4) rencana kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, merupakan salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD dalam rangka penyesuaian terhadap pencapaian target indikator kinerja yang mendukung terhadap Visi Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan yang secara rinci disajikan kegiatan/subkegiatan tahun 2025, pergeseran kegiatan/subkegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman atau dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

Agar pelaksanaan perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, maka seluruh Perangka Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mensukseskan, mengawal dan melaksanakan perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan harapan target pembangunan pada tahun 2025 dapat tercapai.

